

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH  
MINIMUM DAN INFLASI TERHADAP PENYERAPAN  
TENAGA KERJA DI INDONESIA  
(Kajian Pada Masa COVID-19)**



**Disusun Oleh:**

**LUONG NGOC QUYNH  
NIM. 170604131**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Luong Ngoc Quynh  
NIM : 170604131  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2021

Yang Menyatakan,



Luong Ngoc Quynh

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM  
DAN INFLASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI  
INDONESIA  
(Kajian Pada Masa COVID-19)**

Disusun Oleh:

Luong Ngoc Quynh  
NIM. 170604131

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu

Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

Marwiyati, SE., MM  
NIP. 197404172005012002

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

# LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Luong Ngoc Quynh  
NIM. 170604131

Dengan Judul:

## **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia (Kajian Pada Masa COVID-19)**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi  
Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal : Jumat 30 Juli 2021 M  
20 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

Marwiyati, SE., MM  
NIP. 197404172005012002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
NIP. 197204282005011003

A.Rahmat Adi, SE., M.Si  
NIDN. 2025027902



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fuad, M.Ag.  
19640314 1992031003



## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Luong Ngoc Quynh  
NIM : 170604131  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
E-mail : 170604131@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

Yang berjudul:

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia (Kajian Pada Masa COVID-19)**

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

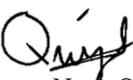
Pada tanggal : 25 Oktober 2020

Mengetahui

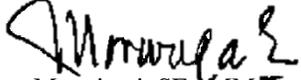
Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Luong Ngoc Quynh  
NIM. 170604131

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP.197204281999031005

  
Marwiyati, SE., MM.  
NIP.197404172005012002

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia (Kajian Pada Masa COVID-19)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dosen Pembimbing 1 yang dengan kesabaran beliau telah membimbing dan memberikan kontribusi yang sangat

banyak kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Marwiyati, SE., MM selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.

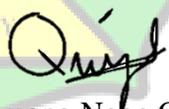
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry.
4. A. Rahmat Adi, SE., M.Si selaku Dosen Penguji1 dan Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan saran-saran dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. A. Rahmat Adi, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA), seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama masa kuliah.
6. Ayahanda tercinta Luong Ngoc Hung dan Ibunda tercinta Ma Thi Thanh Ha yang telah menjaga, membesarkan, mendidik dan mendoakan dengan penuh kasih dan sayang sehingga penulis senantiasa bersemangat untuk menggapai cita-cita jenjang pendidikan perguruan tinggi. Dan kepada Thanh Nu Da Thao, Luong Thai Hien, Luong Ngoc Uyen dan Muhammad Hafiz sebagai kakak, abang dan adik-adik yang selalu memberikan dukungan dan doa serta menjadi penyemangat bagi penulis.

7. Sahabat-sahabatku Ain Mawardah, Nur Annisa, Sawiyah Raudhatul Jannah, Riadhil Jannah, Dinda Assaidatina dan Irdina Huda terima kasih selama ini mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini hingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di seluruh Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2017 yang telah membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir sekali, penulis serahkan kepada Allah SWT untuk membalasnya. Aamiinn.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Penulis

  
Luong Ngoc Quynh

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ث	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *marbutoh* (ة) hidup  
Ta *marbutoh* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutoh* (ة) mati  
Ta *marbutoh* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Luong Ngoc Quynh  
NIM : 170604131  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia (Kajian Pada Masa COVID-19)  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM  
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Inflasi, Dummy COVID-19 Dan Penyerapan Tenaga Kerja.

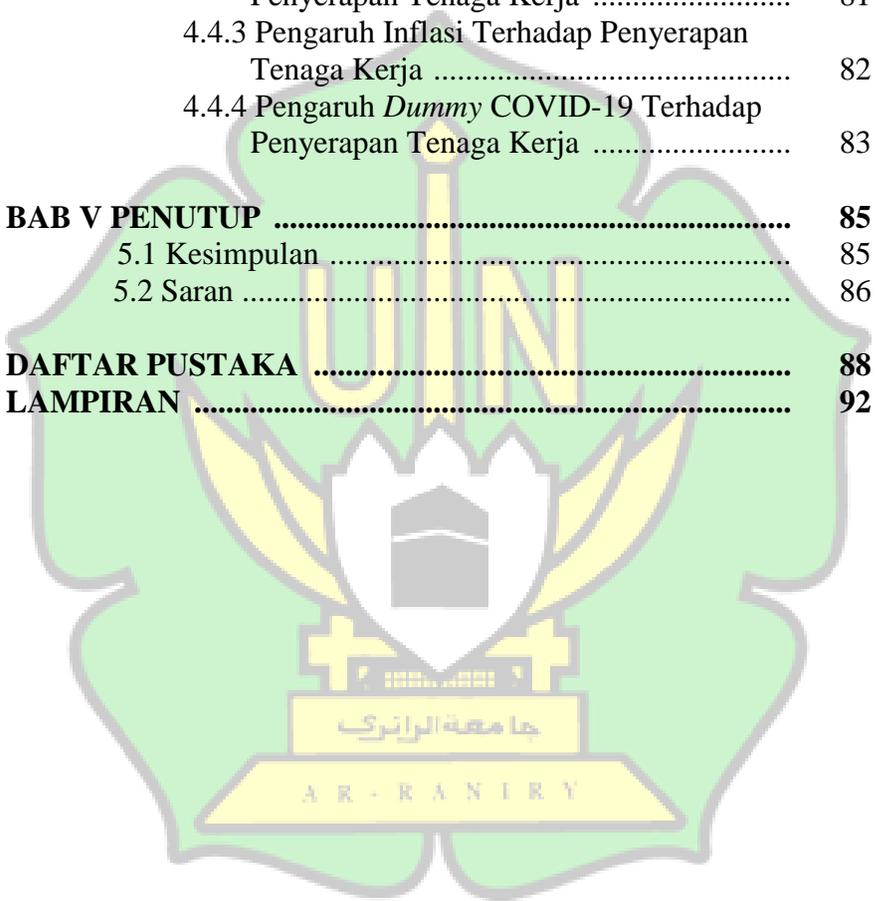
Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tidak proporsional dengan kesempatan kerja akan menyebabkan kekhawatiran yang signifikan bagi bagi negara pasca-industri karena dapat berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi, dan Dummy COVID-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah panel least square dengan model Random Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja , sedangkan upah minimum, inflasi dan Dummy COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus mendorong sektor ekonomi yang lebih luas, menetapkan upah minimum yang adil, mempertahankan tingkat inflasi yang ideal, terutama ketika pandemi COVID-19 untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Masalah .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	12
2.1.1 Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi .....	16
2.2 Upah Minimum .....	18
2.2.1 Penggolongan Upah .....	19
2.2.2 Teori Pembentukan Harga Upah .....	19
2.2.3 Faktor Yang Menimbulkan Perbedaan Upah .....	21
2.3 Inflasi .....	23
2.3.1 Teori Inflasi .....	24
2.3.2 Penggolongan Inflasi .....	26
2.4 Konsep Ketenagakerjaan .....	27
2.4.1 Klasifikasi Tenaga Kerja .....	28
2.4.2 Teori Ketenagakerjaan .....	29

2.5 Konsep Penyerapan Tenaga Kerja .....	30
2.5.1 Pasar Tenaga Kerja .....	30
2.6 Keterkaitan Antar Variabel .....	33
2.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	33
2.6.2 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	35
2.6.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	35
2.7 Penelitian Terkait .....	36
2.8 Kerangka Pemikiran .....	40
2.9 Pengembangan Hipotesis .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.3 Populasi dan Sampel .....	43
3.4 Variabel Penelitian .....	44
3.4.1 Klasifikasi Variabel .....	44
3.4.2 Definisi Operasional Variabel .....	44
3.5 Metode Analisis .....	46
3.6 Model Estimasi .....	47
3.6.1 Penentuan Model Estimasi .....	47
3.6.2 Tahapan Pengujian Model .....	50
3.7 Pengujian Hipotesis .....	51
3.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) .....	51
3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Umum Indonesia .....	53
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	55
4.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja .....	55
4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi .....	60
4.2.3 Upah Minimum .....	64
4.2.4 Inflasi .....	68
4.3 Analisis Data Inferensial .....	72
4.3.1 Penentuan Model Estimasi Inferensial .....	72

4.3.2 Uji Kriteria Statistik (Uji Signifikansi) .....	76
4.3.3 Analisis Regresi Data Panel .....	78
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	80
4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	80
4.4.2 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	81
4.4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	82
4.4.4 Pengaruh <i>Dummy</i> COVID-19 Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Angkatan Kerja Di Indonesia Tahun 2015-2020 .....	2
Tabel 1.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Inflasi Di Indonesia Tahun 2015-2020 .....	6
Tabel 4.1	Wilayah Provinsi Di Indonesia .....	54
Tabel 4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	55
Tabel 4.3	Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Indonesia Tahun 2010-2020 .....	57
Tabel 4.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2020 .....	61
Tabel 4.5	Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2020 .....	65
Tabel 4.6	Tingkat Inflasi Di Indonesia Tahun 2010-2020 .....	69
Tabel 4.7	Hipotesis Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier .....	73
Tabel 4.8	Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier .....	75
Tabel 4.9	Hasil Estimasi Random Effect Model .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja .....	32
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran Teoretis .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Analisis Regresi Panel  
Lampiran 2 : Hasil Uji Common Effect Model  
Lampiran 3 : Hasil Uji Fixed Effect Model  
Lampiran 4 : Hasil Uji Random Effect Model  
Lampiran 5 : Hasil Uji Chow  
Lampiran 6 : Hasil Uji Hausman  
Lampiran 7 : Hasil Uji Lagrange Multiplier  
Lampiran 8 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif  
Lampiran 9 : Biodata Penulis



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel antara lain adalah sumber daya manusia (SDM). Tenaga kerja merupakan bagian dari sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor produksi yang menjadi penggerak dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Tenaga kerja memiliki peranan yang penting untuk menciptakan kegiatan ekonomi dalam usaha meningkatkan produksi, karena tanpa adanya tenaga kerja akan menyebabkan proses produksi tidak bisa berjalan dengan lancar. Selain sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi, tenaga kerja dalam jumlah yang besar juga bisa menjadi penghambat pembangunan nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sehingga menimbulkan masalah mengenai tenaga kerja. Ketenagakerjaan menjadi masalah terbesar bagi suatu negara dari masa ke masa karena berkaitan dengan pengangguran, di mana pengangguran yang tinggi menurunkan produktivitas dan pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya (Silalahi dkk, 2013). Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, di mana jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan ketersediaan

lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk dalam usia kerja tidak memperoleh pekerjaan.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Angkatan Kerja Di Indonesia**  
**Tahun 2015-2020**

Tahun	Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran
2015	114.819.199	7.560.822
2016	118.411.973	7.031.755
2017	121.022.423	7.040.323
2018	126.282.186	7.073.385
2019	128.755.271	7.104.424
2020	128.454.184	9.767.754

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015-2020)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang ditampilkan pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2020 yaitu sebanyak 128,45 juta orang mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 114,81 juta orang, begitu juga dengan angka pengangguran yang terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja senantiasa bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan angkatan kerja dan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja akan menjadi penyumbang kepada peningkatan angka pengangguran di Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus mampu menciptakan dan menyediakan kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja baru secara maksimal supaya angka pengangguran dapat

dikurangkan. Oleh karena itu, kesempatan kerja merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, pembangunan yang telah dilaksanakan di negara berkembang termasuk Indonesia tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang ada karena laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan kesempatan kerja.

Masalah mengenai ketenagakerjaan di Indonesia semakin memburuk ketika pandemi COVID-19 mulai mewabah di negara ini dan seluruh dunia pada tahun 2020 di mana kondisi ini bukan sahaja menyebabkan krisis kesehatan tetapi juga menyentuh sendi-sendi perekonomian. Akibat dari pandemi ini aktivitas perekonomian menjadi terhambat dan banyak perusahaan yang terkesan hingga terpaksa membatasi jumlah tenaga kerja yang diserap serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja. Secara menyeluruh, hampir setiap sektor kehidupan masyarakat merasakan dampak akibat pandemi COVID-19 termasuk penyerapan tenaga kerja.

Secara makro, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di suatu perekonomian, antaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mendorong kegiatan dalam perekonomian sehingga barang dan jasa yang akan dihasilkan bertambah. Semakin besar permintaan terhadap barang dan jasa maka semakin banyak barang dan jasa yang akan dihasilkan. Peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang

mampu dihasilkan oleh suatu negara menandakan adanya peningkatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator makro yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara (Hasyim, 2016:232).

Lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi riil berkaitan erat melalui fungsi produksi agregat yang dihubungkan melalui Hukum Okun (*Okun's Law*) yang ditemukan oleh Arthur Okun (1962). Hukum Okun menyatakan bahwa tingkat pengangguran menurun ketika pertumbuhan ekonomi riil relatif tinggi dan berada di atas 3 persen, dan tingkat pengangguran meningkat ketika pertumbuhan ekonomi riil relatif rendah yaitu di bawah 3 persen. Lapangan kerja cenderung meningkat dan tingkat pengangguran cenderung menurun ketika tingkat pertumbuhan ekonomi riil tinggi (Acemoglu, Laibson & List, 2015:311).

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah upah minimum. Dalam teori tenaga kerja, upah ditempatkan sebagai harga dari tenaga kerja yang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan pengusaha kepada tenaga kerja untuk melindungi para pekerja dari mendapatkan upah yang terlalu rendah, sehingga upah yang

diterima seimbang dengan kinerja yang mereka lakukan dan mencukupi standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Mankiw (2013:122) penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah di atas upah keseimbangan pasar akan menyebabkan jumlah penawaran tenaga kerja meningkat dan jumlah permintaan tenaga kerja menurun. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja karena jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan upah minimum telah menjadi masalah ketenagakerjaan yang memicu peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah inflasi karena perubahan tingkat inflasi akan berdampak pada hasil produksi dan mempengaruhi sebuah perusahaan untuk menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Harga barang yang menaik ketika inflasi terjadi adalah karena keterbatasan barang tersebut untuk memenuhi semua permintaan sehingga mendorong kenaikan dalam hasil produksi. Hasil produksi yang lebih besar akan mendorong produsen untuk menambahkan faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja ketika memproduksi hasil barang dan jasa yang lebih besar sehingga menurunkan jumlah pengangguran.

Kurva Phillips yang dikemukakan oleh A.W. Phillips menggambarkan keterkaitan antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Inflasi adalah perubahan tingkat harga barang dan jasa dan karena tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan hasil produksi, maka terdapat hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Kurva Phillips menunjukkan adanya *trade-off* jangka pendek antara inflasi dan tingkat pengangguran, di mana tahun-tahun dengan tingkat pengangguran rendah cenderung memiliki inflasi tinggi, sedangkan tahun-tahun dengan pengangguran tinggi cenderung memiliki inflasi rendah (Mankiw, 2013:288). Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi di Indonesia periode tahun 2015 sehingga 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Upah**  
**Minimum dan Inflasi Di Indonesia**  
**Tahun 2015-2020**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Upah Minimum (Rp)	Inflasi (%)
2015	4.88	1,790,342	3.35
2016	5.03	1,997,819	3.02
2017	5.07	2,175,824	3.61
2018	5.17	2,365,339	3.13
2019	5.02	2,555,275	2.72
2020	-2.07	2,772,729	1.68

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015-2020)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuatif sepanjang periode 2015 sehingga 2020. Sedangkan upah

minimum terus mengalami peningkatan apabila pada tahun 2020 upah minimum adalah sebanyak Rp 2.7 juta dibandingkan pada tahun 2015 yaitu sebanyak Rp 1.7 juta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusniati, Sudarti & Agustin (2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sokian, Amir & Zamzami (2020) melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurut Wijaya, Indrawati & Pailis (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa setiap kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang diserap. Kumar (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Atiyatna, Nurlina & Soebyakto (2016) menjelaskan bahwa upah minimum mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut Handayani, Saleh & Muslihatinningsih (2018) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan

pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap.

Menurut penelitian Ziyadaturrofiqah, Zulfanetti & Safri (2018) menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Prawoto (2018) melihat pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja.

Warapsari, Hidayat & Boedirochminarni (2020) menjelaskan bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan upah minimum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Shafira (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah karena tingkat inflasi tertinggi di Jawa Tengah masih dalam intensitas ringan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang jelas dan disertakan bukti ilmiah tentang bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia serta perbedaan penyerapan

tenaga kerja Indonesia sebelum dan pada saat COVID-19. Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia (Kajian Pada Masa COVID-19)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
2. Berapa besar pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Berapa besar pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
4. Berapa besar pengaruh *dummy* COVID-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh *dummy* COVID-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat penelitian ini yang diperoleh oleh beberapa pihak di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan pemikiran dalam upaya pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Selain itu penelitian ini adalah sebagai pengalaman saya dalam menyusun karya ilmiah.

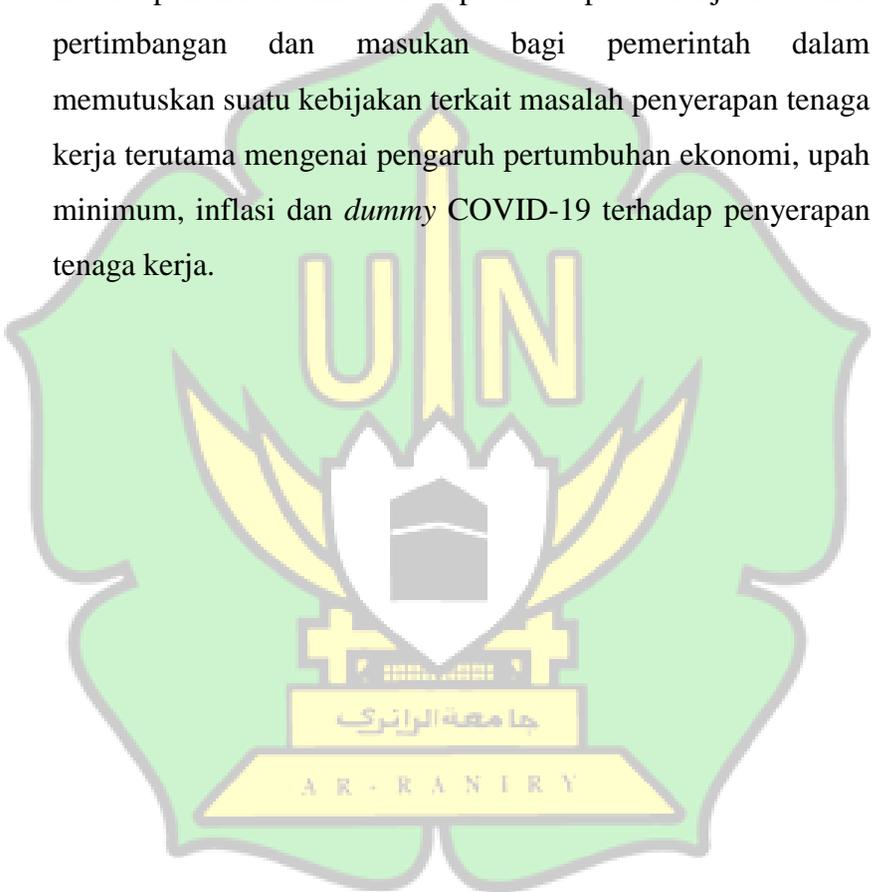
- b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,

terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan digunakan sebagai bahan perbandingan.

### 3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan terkait masalah penyerapan tenaga kerja terutama mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19 terhadap penyerapan tenaga kerja.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Isu mengenai pertumbuhan ekonomi yang selalu diperhatikan adalah masalah kelesuan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Menurut Pambudi (2013), pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Menurut Sukirno (2012:423), suatu aktivitas perekonomian berkembang dari waktu ke waktu, sehingga mampu menghasilkan pertambahan pada jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur dan pertambahan produksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Perkembangan kemampuan menghasilkan barang dan jasa ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami kenaikan dalam jumlah dan kualitasnya sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang akan menjadi pendapatan bagi masyarakat.

Ukuran yang selalu digunakan untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi dan untuk menghitung pertumbuhannya dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain (Sukirno, 2012:50).

Menurut Hasyim (2016:232) indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara adalah data produk domestik bruto (PDB). PDB merupakan total pendapatan yang dihasilkan dari semua barang dan jasa di dalam suatu negara, termasuk pendapatan orang asing yang bekerja di dalam negara tersebut. Sementara data produk nasional bruto (PNB) kurang lazim dipakai karena hanya melihat batas wilayah pada negara yang bersangkutan (Hasyim, 2016:38).

### **2.1.1 Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan telah banyak dibahas sehingga melahirkan beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2012:432), terdapat empat teori tentang pertumbuhan ekonomi, antara lain yaitu:

#### **1. Teori Pertumbuhan Klasik**

Ahli-ahli ekonomi Klasik berpandangan bahwa ada empat faktor yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Tetapi para ahli ekonomi Klasik lebih menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga muncul teori penduduk optimum. Menurut teori ini, jumlah penduduk yang terlalu banyak akan menurunkan tingkat produksi marjinal sehingga pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

2. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha yang membuat inovasi ketika perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang untuk memperoleh keuntungan. Inovasi ini akan memerlukan investasi baru yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian suatu negara sehingga mendorong pengusaha untuk melakukan lebih banyak inovasi dan investasi baru.

3. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (*steady growth*) dalam jangka panjang dengan menggunakan pemisalan-pemisalan berikut: (1) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (3) rasio-modal

produksi (*capital-output ratio*), dan (4) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila pengeluaran agregat meningkat melalui penambahan investasi secara terus-menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan yaitu sebesar  $(I + \Delta I)$ .

#### 4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow ini melihat dari segi penawaran. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T) \quad (2.1)$$

Dimana:

$\Delta Y$  adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.

$\Delta K$  adalah tingkat pertumbuhan modal.

$\Delta L$  adalah tingkat pertumbuhan penduduk.

$\Delta T$  adalah tingkat perkembangan teknologi.

Sumbangan yang paling penting dari pertumbuhan Neo-Klasik adalah teori tersebut digunakan untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menunjukkan peranan sebenar berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan teori ini menyimpulkan bahwa faktor terpenting

yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

### **2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Terdapat beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan aktivitas perekonomian dan dapat dijadikan sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Pambudi (2013) yaitu:

1. Aglomerasi atau pola pemusatan, artinya terjadi pemusatan berbagai industri dalam suatu tempat tertentu sehingga mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut.
2. Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan bertujuan untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah tersedia supaya meningkatkan jumlah produksi.
3. Angkatan kerja yang bekerja adalah penduduk yang berusia 16 tahun atau lebih yang sudah bekerja atau sedang mencari kerja atau kegiatan lain.
4. *Human capital investment* merupakan pengaruh pendidikan formal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh seseorang maka akan semakin tinggi produktivitas kerja orang tersebut.

Menurut Hasyim (2016:258) pada dasarnya ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Faktor Penawaran, dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh lima kategori yaitu: sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), stok modal, kewirausahaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kelima kategori tersebut merupakan bentuk barang dan jasa yang ditawarkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi.
2. Faktor Permintaan, ekonomi pasar bebas tidak dapat berkembang tanpa permintaan barang tambahan yang dapat dihasilkan oleh perekonomian. Perubahan faktor penawaran yang diikuti oleh perubahan permintaan akan menghasilkan stimulus yang cukup untuk perekonomian. Tingginya tingkat permintaan barang dan jasa akan meningkatkan produksi, lapangan kerja dan pendapatan. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Faktor-faktor Non-Ekonomi, ketiga faktor non-ekonomi yaitu kebudayaan, agama dan tradisi sosial mempunyai pengaruh terhadap perekonomian sama ada menjadi pendukung atau penghambat pertumbuhan ekonomi. Budaya yang menjadi pendorong pembangunan adalah sikap bekerja keras, kerja cerdas dan sebagainya.

## 2.2 Upah Minimum

Menurut Sukirno (2013:351), upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik, maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Menurut Rivai (2014:554), upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Besarnya upah dapat berubah-ubah, tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap. Konsep upah biasanya dikaitkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional mendefinisikan upah sebagai suatu penerimaan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi (Yusuf, 2015:248). Pemerintah di banyak negara selalu berusaha untuk melindungi pekerja dengan menetapkan undang-undang suatu tingkat upah minimum yang dibayar oleh perusahaan kepada pekerjanya yang dikenal upah minimum regional (UMR), di mana pengusaha tidak boleh membayar upah kepada pekerja di bawah ketentuan upah minimum. Tingkat upah minimum regional berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain dan ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan dan tingkat perkembangan perusahaan (Suparmoko & Sofilda, 2014:182).

### **2.2.1 Penggolongan Upah**

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) upah minimum regional merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut Sukirno (2013:351) upah terbagi menjadi dua yaitu upah riil dan upah uang. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

Upah sistem waktu merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya. Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit dan dibayar berdasarkan banyaknya hasil yang dikerjakan. Upah sistem borongan adalah cara pengupahan yang didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya (Rivai, 2014:554).

### **2.2.2 Teori Pembentukan Harga Upah**

Menurut Asyhadie dalam Sari (2015) ada beberapa teori yang harus diperhatikan sebagai teori dasar untuk membentuk harga upah tenaga kerja yaitu:

1. Teori Upah Nominal (David Ricardo)

Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan melihat biaya yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan tenaga kerja. Teori ini menjelaskan bahwa sejumlah uang yang diterima tenaga kerja sebagai upah itu adalah kewajaran demikian besarnya karena memang hanya demikian kemampuan pengusaha.

2. Teori Upah Besi (Ferdinand Lassalle)

Menurut teori ini, pembayaran upah berdasarkan teori upah nominal hanya memenangkan pengusaha sehingga pekerja berada dalam posisi yang sulit karena upah telah ditetapkan oleh pengusaha. Berhubungan dengan kondisi tersebut, teori ini dikenal sebagai “Teori Upah Besi”. Kemudian Lassalle menganjurkan untuk menentang kebijakan para produsen terhadap upah dengan membentuk serikat pekerja

3. Teori Dana Upah (John Stuart Mill)

Menurut teori ini, upah yang diterima para pekerja itu sebenarnya tergantung kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika jumlah dana yang ada dalam masyarakat besar, maka upah yang akan diterima pekerja juga besar. Sebaliknya jika jumlah dana tersebut berkurang akan mendorong penurunan upah yang akan diterima pekerja.

4. Teori Upah Etika

Teori ini mempersoalkan seberapa jauh upah yang diterima pekerja mampu mencukupi segala keperluan hidupnya beserta keluarganya. Oleh karena itu, teori ini menganjurkan untuk

menyediakan dana khusus oleh pengusaha atau Negara yang disebut dana anak-anak untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya.

### **2.2.3 Faktor Yang Menimbulkan Perbedaan Upah**

Menurut Sukirno (2013:364) faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara para pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerjaan adalah sebagai berikut:

#### **1. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja**

Peranan permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam sesuatu jenis pekerjaan sangat besar dalam penentuan upah di pekerjaan tersebut. Apabila terdapat penawaran tenaga kerja dalam suatu pekerjaan lebih besar daripada permintaan tenaga kerja, maka upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah.

#### **2. Perbedaan Corak Pekerjaan**

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan, di mana ada di antara pekerjaan tersebut mudah dilakukan dan ada pula yang harus mengeluarkan tenaga fisik yang besar dengan risiko yang tinggi. Perbedaan jenis pekerjaan tersebut yang akan menimbulkan perbedaan upah.

#### **3. Perbedaan Kemampuan, Keahlian dan Pendidikan**

Dalam perekonomian yang semakin maju kegiatan-kegiatan ekonomi semakin memerlukan tenaga kerja yang mampu menjalankan kegiatan perekonomian secara modern. Setiap

jenis pekerjaan memerlukan kemampuan, ketrampilan dan keahlian yang berbeda. Makin rumit suatu pekerjaan akan menyebabkan tenaga kerja yang terdidik diperlukan. Kekurangan penawaran tenaga kerja terdidik menyebabkan upah yang diperolehnya lebih tinggi karena pendidikannya meningkatkan kemampuan kerjanya sehingga menaikkan produktivitas.

#### 4. Pertimbangan Bukan Keuangan

Banyak faktor bukan keuangan mempunyai peranan yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pekerjaan. Seseorang akan bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila pertimbangan bukan keuangan itu sesuai dengan keinginannya. Namun sebaliknya, apabila pertimbangan bukan keuangan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, orang tersebut akan menuntut upah yang lebih tinggi sebelum menerima tawaran pekerjaan.

#### 5. Mobilitas Tenaga Kerja

Upah dari sesuatu pekerjaan di setiap wilayah tidak selalu sama. Hal tersebut menyebabkan tenaga kerja berpindah ke tempat yang memberikan upah yang lebih tinggi. Ketidaktepatan dalam mobilitas tenaga kerja menimbulkan perbedaan upah dan dua faktor yang menimbulkan ketidaktepatan tersebut adalah faktor geografis dan faktor institusional.

## 2.3 Inflasi

Menurut Prawoto (2019:82) inflasi adalah harga-harga yang secara umum meningkat dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi rumah tangga yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Menurut Boediono dalam Silalahi dkk (2013:213), inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Inflasi menggambarkan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh.

Menurut Silalahi dkk (2013:213), tingkat harga dalam perekonomian dapat dipandang dari dua sisi yaitu pertama adalah harga sejumlah barang dan jasa dan kedua adalah kenaikan tingkat harga. Inflasi biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikan berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. yang menyebabkan perlu dibentuk suatu indeks harga. Indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen (IHK) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat inflasi adalah sebagai berikut (Syamsuddin & Karya, 2016:90):

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Keterangan:

$IHK_t$  : Indeks Harga Konsumen tahun t.

$IHK_{t-1}$  : Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya.

### 2.3.1 Teori Inflasi

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses inflasi dan masing-masing bukan teori inflasi yang lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses kenaikan harga ini. Dalam penerapannya kita harus menentukan aspek-aspek mana yang dalam kenyataan penting di dalam proses inflasi di suatu negara, dan dengan demikian teori mana (atau kombinasi teori-teori mana) yang lebih cocok. Teori-teori inflasi adalah sebagai berikut (Silalahi dkk, 2013:214):

#### 1. Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah pertama, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar dan akan berhenti jika jumlah uang yang beredar tidak bertambah. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju penambahan uang yang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa akan mendatang.

Ada tiga kemungkinan keadaan yaitu, pertama ketika inflasi masih baru mulai dan masyarakat masih belum sadar terjadinya inflasi, kedua di mana masyarakat mulai sadar adanya inflasi

dan ketiga tahap hiperinflasi di mana masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap nilai mata uang.

## 2. Teori Keynes

Proses inflasi menurut Keynes tidak lain adalah proses perebutan bagian di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Hal tersebut menyebabkan permintaan efektif masyarakat akan barang-barang (permintaan agregat) selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), sehingga harga-harga akan naik dan mengakibatkan timbulnya *inflationary gap* atau celah inflasi.

## 3. Teori Strukturalis

Menurut teori ini, ada dua ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi yaitu tidak-elastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban karena harga di pasar dunia dan barang-barang ekspor negara-negara makin tidak menguntungkan dibanding dengan barang-barang impor yang harus dibayar (*term of trade*). Ketegaran kedua berkaitan dengan tidak-elastisan dari *supply* atau produksi bahan makanan di dalam negeri yang tumbuh tidak secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk menaik.

### 2.3.2 Penggolongan Inflasi

Menurut Boediono, penggolongan inflasi berdasarkan tingkat parah atau tidaknya dibedakan menjadi empat macam, yaitu inflasi ringan kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang antara 10-30% per tahun, inflasi berat antara 30-100% per tahun dan hiperinflasi di atas 100% per tahun (Suparmoko & Safilda, 2014:189).

Penggolongan inflasi berdasarkan asal usulnya dibagi menjadi dua jenis yaitu *Domestic Inflation* dan *Imported Inflation*. *Domestic Inflation* yaitu inflasi yang timbul dari dalam negeri yang disebabkan defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru, kegagalan pasar akibat ketidakseimbangan antara permintaan masyarakat dengan penawaran barang-barang di pasar dan harga jual meningkat akibat adanya peningkatan biaya produksi barang dalam negeri. *Imported Inflation* terjadi disebabkan kenaikan harga-harga barang impor dari luar negeri akibat dari biaya produksi barang dari luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Selain itu inflasi bersumber dari luar negeri terjadi karena kenaikan pesat volume ekspor yang akan menambah devisa negara dan menaikkan pendapatan nasional (Silalahi dkk, 2013:227):

Menurut Silalahi dkk. (2013:225), berdasarkan kepada penyebab terjadinya inflasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk. *Demand Pull Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.

Peningkatan permintaan tersebut melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan menghasilkan barang dan jasa sehingga mendorong para pengusaha menaikkan harga barang dan menjual kepada konsumen yang bersedia membayar pada harga yang tinggi. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi di mana perusahaan akan menjual barang pada harga yang lebih tinggi untuk menutupi biaya produksi tersebut.

#### **2.4 Konsep Ketenagakerjaan**

Tenaga kerja (*manpower*) menurut Mulyadi (2014:71) adalah penduduk dalam usia kerja yakni penduduk yang berusia 15-64 tahun atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat menghasilkan barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Pujoalwanto, 2014:108). Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja bermakna pada kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Machmud (2016:239) penduduk usia kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Angkatan Kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi untuk

sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari bekerja dan pengangguran.

2. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, serta para pengangguran sukarela.

#### **2.4.1 Klasifikasi Tenaga Kerja**

Secara umum, klasifikasi tenaga kerja dapat dipilah berdasarkan tiga golongan, yaitu (Pujoalwanto, 2014:108):

1. Berdasarkan penduduknya, di mana penduduk suatu negara terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja
2. Berdasarkan batas kerja di mana tenaga kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.
3. Berdasarkan kualitasnya, di mana tenaga kerja dibedakan antara tenaga kerja terdidik yaitu mereka yang mempunyai keahlian yang diperoleh dengan pendidikan. Kedua tenaga kerja terampil yang memiliki keahlian dari pengalaman kerja dan latihan secara berulang-ulang serta tenaga kerja tidak terdidik yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja dalam pekerjaan mereka.

Menurut Latumaerissa (2015: 56) tenaga kerja di negara-negara berkembang (*under developing countries*) terdiri dari tiga

golongan yaitu tenaga kerja yang produktif, tenaga kerja yang kurang produktif dan tenaga kerja penganggur. Pada umumnya tenaga kerja di negara sedang berkembang kurang produktif karena kekurangan keterampilan, pengalaman, pendidikan dan cara bekerja yang masih tradisional sehingga menurunkan produktivitas kerja dan pendapatan mereka sehingga perlu dilakukan pembinaan, penyuluhan dan latihan-latihan kerja supaya mereka makin terampil dan pembangunan ekonomi lebih cepat.

#### **2.4.2 Teori Ketenagakerjaan**

Menurut Mulyadi (2014:70) beberapa teori penting yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan yaitu teori Lewis dan Fei-Ranis. Teori Lewis (1959) mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan di mana kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terkebelakang akan diserap ke dalam sektor industri modern sehingga akan menaikkan tingkat upah di pedesaan yang akan mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

Teori Fei-Ranis (1961) berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri seperti kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, banyak pengangguran, sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian, dan tingkat

pertumbuhan penduduk yang besar. Pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh adalah kelebihan pekerja akan diserap ke dalam sektor jasa dan industri secara terus-menerus sejalan dengan penambahan *output* dan perluasan usahanya.

## **2.5 Konsep Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut Kuncoro dalam Maryati, dkk (2021) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan perbedaan kemampuan antara suatu sektor dengan sektor yang lain dalam menyerap tenaga kerja. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda yang akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Mengacu pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha tertentu.

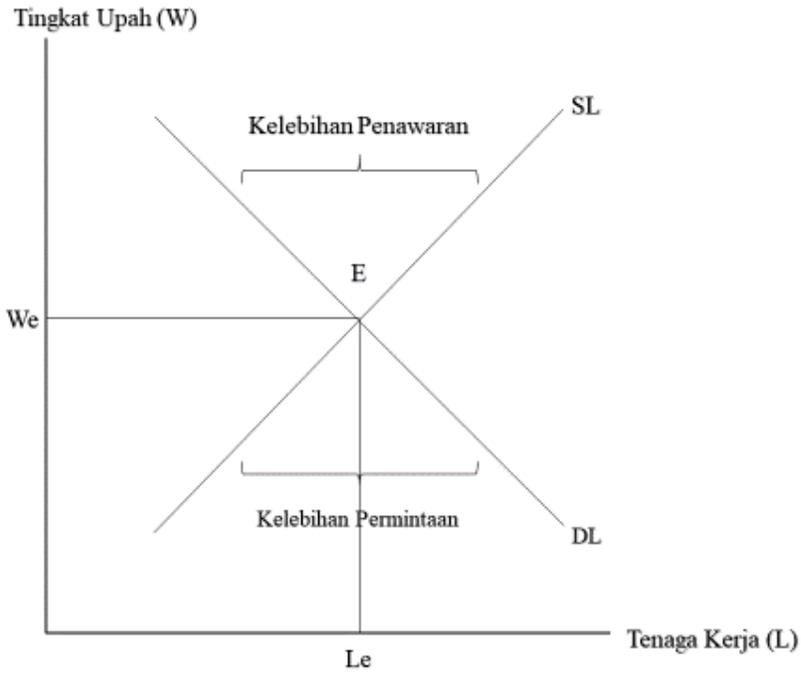
### **2.5.1 Pasar Tenaga Kerja**

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi juga memiliki pasar yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja

merupakan tempat pertemuan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja, di mana penawaran tenaga kerja adalah dari angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja adalah dari lembaga atau perusahaan yang memerlukan tenaga kerja (Suhardi, 2016:319).

Dalam konteks pasar tenaga kerja, tingkat upah ditentukan oleh keseimbangan di antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun pasar tenaga kerja berbeda dari sebagian pasar lainnya karena permintaan tenaga kerja merupakan permintaan tak langsung atau *derived demand* di mana permintaan terhadap tenaga kerja ditentukan oleh sifat permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan (Sukirno, 2016:69). Peningkatan permintaan terhadap barang akan meningkatkan permintaan tenaga kerja karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan produksi.

Menurut Chusna (2013) penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Ketika upah meningkat, ketersediaan orang-orang untuk bekerja juga meningkat, di mana pekerja secara optimal mengalokasikan waktu mereka yang terbatas untuk bekerja (Sukirno, 2016:71). Sesuai dengan hukum penawaran maka pada tingkat upah yang tinggi akan banyak jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, sedangkan pada tingkat upah yang rendah akan lebih sedikit tenaga kerja yang ditawarkan (Suparmoko & Sofilda, 2014:163).



**Gambar 2.1**

**Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja**

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penawaran tenaga kerja adalah sama dengan jumlah permintaan tenaga kerja pada tingkat upah keseimbangan pasar yaitu di titik *E*. Kondisi tersebut menunjukkan perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh, di mana tidak akan terjadi kelebihan penawaran maupun permintaan tenaga kerja. Ketika upah di atas upah keseimbangan pasar, maka akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, sedangkan ketika upah di bawah upah keseimbangan pasar maka akan terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja (Mulyadi, 2014:69).

Ahli-ahli ekonomi Klasik berpendapat bahwa tingkat kegiatan perekonomian akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh karena upah telah menyesuaikan diri hingga kuantitas permintaan dan penawaran tenaga kerja seimbang. Kesempatan kerja penuh dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan (Sukirno, 2016:68).

Secara makro, laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Adapun rumus untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja adalah (Latumaerissa, 2015:69):

$$E_{kk} = \frac{\Delta KK}{\Delta PDB} \quad (2.3)$$

Di mana:

$E_{kk}$  : Elastisitas kesempatan kerja

$\Delta KK$  : Laju pertumbuhan kesempatan kerja

$\Delta PDB$  : Laju pertumbuhan ekonomi

## **2.6 Keterkaitan Antar Variabel**

### **2.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut Pambudi (2013), pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang

menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Perkembangan kemampuan menghasilkan barang dan jasa ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami kenaikan dalam jumlah dan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong perusahaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja guna untuk menghasilkan barang dan jasa dalam seluruh unit ekonomi sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja berdasarkan teori terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang dihubungkan melalui Hukum Okun (*Okun's Law*). Okun menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, di mana lapangan kerja cenderung meningkat dan tingkat pengangguran cenderung menurun ketika tingkat pertumbuhan ekonomi riil tinggi ((Acemoglu, Laibson & List, 2015:311). Menurut Hasyim (2016:232) indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat diartikan sebagai total pendapatan yang dihasilkan dari semua barang dan jasa di dalam negara tersebut.

## **2.6.2 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut Sukirno (2013:351), upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik, maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Bagi perusahaan upah merupakan biaya produksi perusahaan di mana tinggi rendahnya upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang dihasilkan. Apabila harga naik, maka permintaan akan barang dan jasa menurun sehingga memaksa perusahaan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam proses produksinya. Jadi, hubungan upah dengan penyerapan tenaga kerja bersifat negatif.

Ketika upah minimum dari tenaga kerja yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi dari upah keseimbangan pasar maka akan menyebabkan jumlah permintaan tenaga kerja menurun yang berarti kesempatan kerja juga mengalami penurunan. Sebaliknya jika upah minimum dari tenaga kerja tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat upah keseimbangan pasar maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha dan kesempatan kerja juga meningkat (Mankiw, 2013:122).

## **2.6.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Inflasi yang terjadi dalam perekonomian akan berdampak pada hasil produksi dan mempengaruhi sebuah perusahaan untuk

menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja. Sesuai dengan hukum permintaan, kenaikan harga barang dan jasa terjadi karena adanya permintaan terhadap barang dan jasa tersebut. Kenaikan permintaan agregat terhadap barang dan jasa dapat mendorong kenaikan dalam hasil produksi, sehingga mendorong perusahaan untuk menambahkan faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan agregat tersebut yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengangguran berkurang.

Selanjutnya, inflasi juga berdampak kepada pengurangan jumlah tenaga kerja hingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang. Inflasi mendorong kenaikan biaya produksi dan menyebabkan perusahaan mengalami kenaikan harga faktor produksi, misalnya kenaikan harga bahan baku tenaga kerja yang menuntut kenaikan upah. Hal ini mengakibatkan unit produk yang dihasilkan lebih sedikit dengan jumlah modal kerja yang sama dan pada harga yang lebih tinggi.

## **2.7 Penelitian Terkait**

Hasil beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat hasil analisis yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Rusniati, Sudarti & Agustin (2018) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Malang. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, ini mengindikasikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka jumlah penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Sedangkan upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sokian, Amir & Zamzami (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Dalam penelitiannya itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sarolangun.

Wijaya, Indrawati & Pailis (2014) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel investasi PMS, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau.

Kumar (2017) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan arah yang negatif, sedangkan investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan arah yang positif.

Atiyatna, Nurlina & Soebyakto (2016) dalam penelitiannya tentang pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, ini menunjukkan bahwa apabila tingkat upah naik maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Kemudian, pendidikan mempunyai hubungan positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana rata-rata tenaga kerja yang terserap di sektor ekonomi adalah tenaga kerja dengan pendidikan SD dan SMP sejalan dengan penduduk yang bekerja pada sektor primer.

Handayani, Saleh & Muslihatinningsih (2018) meneliti tentang determinan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember tahun 2001-2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Kabupaten Jember. Hal ini menandakan bahwa setiap terjadi kenaikan upah minimum maka

jumlah tenaga kerja yang terserap juga akan meningkat. Sedangkan nilai produksi dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Ziyadaturrofiqoh, Zulfanetti & Safri (2018) dalam penelitiannya tentang pengaruh PDRB, upah minimum provinsi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jambi menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan upah minimum provinsi dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jambi.

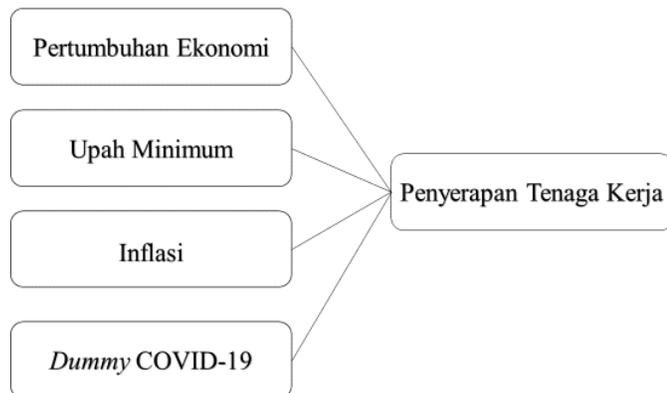
Prawoto (2018) meneliti tentang pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum, PDRB dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2011-2015. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja namun tidak signifikan. Kemudian variabel upah minimum provinsi berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan variabel PDRB dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Warapsari, Hidayat & Boedirochminarni (2020) menemukan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Timur, sedangkan PDRB dan upah minimum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal

ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan diimbangi dengan meningkatnya PDRB dan upah minimum di Jawa Timur.

Shafira (2020) meneliti tentang pengaruh PDRB, upah minimum, inflasi dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa secara parsial PDRB dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan upah minimum dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

## 2.8 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.2**

### **Kerangka Pemikiran Teoritis**

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

1.  $H_{01}$ : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.  
 $H_{a1}$ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2.  $H_{02}$ : Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.  
 $H_{a2}$ : Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3.  $H_{03}$ : Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.  
 $H_{a3}$ : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
4.  $H_{04}$ : *Dummy* COVID-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.  
 $H_{a4}$ : *Dummy* COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:8).

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanasi bertujuan untuk menguji hubungan antar-variabel yang dihipotesiskan untuk mengetahui apakah variabel berasosiasi atau tidak dengan variabel lain dan hipotesis tersebut akan diuji kebenarannya (Mulyadi, 2011:132). Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antar variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang digunakan oleh peneliti lain untuk diproses lebih lanjut (Umar, 2011:42). Dalam hal ini, data

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data jumlah tenaga kerja yang bekerja di Indonesia tahun 2010-2020 yang dinyatakan dalam satuan jiwa.
2. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010-2020 yang dinyatakan dalam satuan persen.
3. Data upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2010-2020 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.
4. Data tingkat inflasi Indonesia tahun 2010-2020 yang dinyatakan dalam satuan persen.
5. *Dummy* COVID-19 untuk data sebelum pandemi COVID-19 diprosikan ke 0, sedangkan pada saat COVID-19 diprosikan ke 1.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu (Sugiyono, 2019:215). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang meliputi populasi dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, inflasi, *dummy* COVID-19 dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sampel pada penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* pada penelitian ini adalah tahun 2010 sehingga 2020 dan

data *cross section* pada penelitian ini adalah 29 provinsi di Indonesia.

### **3.4 Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Klasifikasi Variabel**

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:39). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja (Y).

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2019:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19.

#### **3.4.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel penelitian dilakukan untuk memahami maksud dari setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, instrumen dan sumber pengukurannya. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja menurut Kuncoro dalam Maryati, dkk (2021) adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk

bekerja. Penyerapan tenaga kerja diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada tahun 2010-2020 pada setiap provinsi di Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Pambudi, 2013). Pertumbuhan ekonomi diukur dengan melihat perubahan dari tahun ke tahun produk domestik regional bruto (PDRB) 2010-2020 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 yang dinyatakan dalam satuan persen.
3. Upah minimum adalah upah terendah termasuk tunjangan teratur yang dibayarkan kepada karyawan mengikut jenis pekerjaan (BPS, 2021). Upah minimum pada penelitian ini adalah upah minimum provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2020.
4. Inflasi menurut Silalahi, dkk (2013:213) adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) *year on year* pada tahun 2010-2020.
5. *Dummy* COVID-19 merupakan variabel tambahan untuk melihat perubahan data akibat pandemi COVID-19 yang mula melanda Indonesia pada tahun 2020. Untuk data

sebelum COVID-19 diproksikan ke 0 dan pada saat COVID-19 diproksikan ke 1.

### 3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel (*panel least square*) yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19 terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dengan menggunakan logaritma (Log) adalah sebagai berikut:

$$\text{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PE}_{it} + \beta_2 \text{LogUM}_{it} + \beta_3 \text{INF}_{it} + \beta_4 \text{DM}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Keterangan:

- PTK : Penyerapan Tenaga Kerja  
 $\alpha$  : Konstanta  
PE : Pertumbuhan Ekonomi  
UM : Upah Minimum  
INF : Inflasi  
DM : Variabel *dummy* COVID-19  
Log : Logaritma  
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  : Koefisien regresi  
 $\varepsilon$  : *Error term*  
i : Provinsi (*cross section*)  
t : Waktu (*time series*)

### 3.6 Model Estimasi

Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis panel sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 10. Analisis panel merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan deret lintang (*cross section*).

#### 3.6.1 Penentuan Model Estimasi

Model regresi dengan data panel dapat diestimasi dengan menggunakan tiga metode yaitu (Widarjono, 2013:355):

##### 1. Model *Common Effect*

Model *Common Effect* merupakan metode estimasi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu dengan hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini tidak melihat perbedaan antar waktu dan individu karena metode ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\text{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PE}_{it} + \beta_2 \text{LogUM}_{it} + \beta_3 \text{INF}_{it} + \beta_4 \text{DM}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.2)$$

Keterangan:

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja

$\alpha$  : Konstanta

PE : Pertumbuhan Ekonomi

- UM : Upah Minimum  
 INF : Inflasi  
 DM : Variabel *dummy* COVID-19  
 Log : Logaritma  
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  : Koefisien regresi  
 $\varepsilon$  : *Error term*  
 i : Provinsi (*cross section*)  
 t : Waktu (*time series*)

## 2. Model *Fixed Effect*

Pembentukan model *fixed effect* terjadi karena adanya asumsi model *common effect* yang menyatakan bahwa intersep maupun slope sama baik antar waktu maupun antar perusahaan. Metode ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep antar perusahaan, namun intersepnya sama antar waktu. Sedangkan koefisien regresi (*slope*) tetap sama antar perusahaan dan antar waktu. Perbedaan intersep tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan metode teknik variabel *dummy* sehingga metode ini dikenal dengan metode *Least Squares Dummy Variables* (LSDV). Persamaan modelnya sebagai berikut:

$$\text{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PE}_{it} + \beta_2 \text{LogUM}_{it} + \beta_3 \text{INF}_{it} + \beta_4 \text{DM}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.3)$$

Keterangan:

- PTK : Penyerapan Tenaga Kerja  
 $\alpha$  : Konstanta  
 PE : Pertumbuhan Ekonomi

- UM : Upah Minimum  
 INF : Inflasi  
 DM : Variabel *dummy* COVID-19  
 Log : Logaritma  
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  : Koefisien regresi  
 $\varepsilon$  : *Error term*  
 i : Provinsi (*cross section*)  
 t : Waktu (*time series*)

### 3. Model *Random Effect*

Model *random effect* merupakan metode estimasi yang menggunakan variabel gangguan (*error terms*) untuk mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Metode ini mengasumsikan bahwa intersep adalah variabel *random* atau stokastik. Terdapat dua komponen variabel gangguan dalam model ini yaitu variabel gangguan secara menyeluruh  $e_{it}$  yang merupakan kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu  $\mu_i$ , yang berbeda-beda antar individu tetapi konstan antar waktu. Karena hal inilah, model *random effect* dikenal dengan *Error Component Model* (ECM). Persamaan modelnya adalah sebagai berikut:

$$\text{LogPTK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PE}_{it} + \beta_2 \text{LogUM}_{it} + \beta_3 \text{INF}_{it} + \beta_4 \text{DM}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.4)$$

Keterangan:

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja

$\alpha$	: Konstanta
PE	: Pertumbuhan Ekonomi
UM	: Upah Minimum
INF	: Inflasi
DM	: Variabel <i>dummy</i> COVID-19
Log	: Logaritma
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	: Koefisien regresi
$\varepsilon$	: <i>Error term</i>
$i$	: Provinsi ( <i>cross section</i> )
$t$	: Waktu ( <i>time series</i> )

### 3.6.2 Tahapan Pengujian Model

Keputusan pemilihan antara *common effect model*, *fixed effect model* ataupun *random effect model* yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel ditentukan dengan menggunakan tiga uji yaitu (Subanti, 2014):

1. Uji *chow* digunakan untuk memilih apakah model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat dilakukan untuk mengestimasi data panel dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_1$  : *Fixed Effect Model*

Jika nilai *prob.* > 0.05 ( $H_0$  diterima)

Jika nilai *prob.* < 0.05 ( $H_0$  ditolak)

2. Uji *hausman* dilakukan dengan membandingkan *fixed effect model* dengan *random effect model* dalam memilih model yang

terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : *Random Effect Model*

$H_1$ : *Fixed Effect Model*

Jika nilai *prob.* > 0.05 ( $H_0$  diterima)

Jika nilai *prob.* < 0.05 ( $H_0$  ditolak)

3. Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk menentukan model yang akan digunakan untuk menganalisis data panel adalah *random effect model* atau *common effect model* dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_1$  : *Random Effect Model*

Jika nilai *prob.* > 0.05 ( $H_0$  diterima)

Jika nilai *prob.* < 0.05 ( $H_0$  ditolak)

### **3.7 Pengujian Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2014:250) pengujian hipotesis terdiri dari uji signifikansi parameter individual (uji t) dan uji signifikansi simultan (uji f). Pengujian hipotesis dilakukan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (Suharyadi & Purwanto, 2015:83).

#### **3.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)**

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan (Sugiyono, 2014:250):

1. Jika nilai *Prob*  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai *Prob*  $< 0.05$  maka  $H_1$  diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

### 3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2014:257). Hipotesis yang digunakan:

1. Jika nilai *Prob*, F hitung  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai *Prob*, F hitung  $< 0.05$  maka  $H_1$  diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Indonesia

Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan dan di antara 95° sampai dengan 141° Bujur Timur dan dilalui oleh garis Khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Berdasarkan geografisnya, Indonesia terletak antara Benua Asia dan Benua Australia dan di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Filipina di sebelah utara.
2. Berbatasan dengan Negara Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia di sebelah selatan.
3. Berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah barat.
4. Berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik di sebelah timur.

Wilayah administrasi Indonesia terdiri dari 34 provinsi, di mana luas wilayah masing-masing provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Wilayah Provinsi Di Indonesia**

No	Provinsi	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Aceh	57.956,00
2	Sumatera Utara	72.981,23
3	Sumatera Barat	42.012,89
4	Riau	87.023,66
5	Jambi	50.058,16
6	Sumatera Selatan	91.592,43
7	Bengkulu	19.919,33
8	Lampung	34.623,80
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.424,06
10	Kepulauan Riau	8.201,72
11	DKI Jakarta	664,01
12	Jawa Barat	35.377,76
13	Jawa Tengah	32.800,69
14	DI Yogyakarta	3.133,15
15	Jawa Timur	47.803,49
16	Banten	9.662,92
17	Bali	5.780,06
18	Nusa Tenggara Barat	18.572,32
19	Nusa Tenggara Timur	48.718,10
20	Kalimantan Barat	147.307,00
21	Kalimantan Tengah	153.564,50
22	Kalimantan Selatan	38.744,23
23	Kalimantan Timur	129.066,64
24	Kalimantan Utara	75.467,70
25	Sulawesi Utara	13.892,47
26	Sulawesi Tengah	61.841,29
27	Sulawesi Selatan	46.717,48
28	Sulawesi Tenggara	38.067,70
29	Gorontalo	11.257,07
30	Sulawesi Barat	16.787,18
31	Maluku	46.914,03
32	Maluku Utara	31.982,50
33	Papua Barat	102.955,15
34	Papua	319.036,05
	<b>Indonesia</b>	<b>1.916.906,77</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk melihat pemusatan dan penyebaran dari data tanpa mengambil kesimpulan. Analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan ukuran terhadap data dalam bentuk numerik yang berlaku secara umum dan akan digunakan sebagai data penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan nilai statistik deskriptif variabel penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	Penyerapan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Upah Minimum	Inflasi	<i>Dummy</i>
Mean	14.556	5.179	14.254	4.515	0.090
Max	16.902	26.820	15.266	11.580	1.000
Min	12.665	-9.310	13.353	-0.180	0.000
Std. Dev.	1.024	3.149	0.414	2.512	0.287
Obs	319	319	319	319	319

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10 (2021)

### 4.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran penyerapan tenaga kerja didasarkan pada jumlah angkatan kerja yang bekerja. Berdasarkan tabel 4.2 dari 319 observasi diperoleh nilai rata-rata (*mean*) penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 14.56 dengan

penyerapan tenaga kerja maksimum sebesar 16.90 serta penyerapan tenaga kerja minimum sebesar 12.67. Sementara standar deviasi pada penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini sebesar 1.02. Berikut data penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2010-2020.



**Tabel 4.3**  
**Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Indonesia Tahun 2010-2020**  
**(per 1000 unit)**

<b>Provinsi</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aceh	1776	1852	1799	1825	1932	1966	2087	2139	2204	2220	2360
Sumatera Utara	6125	5912	5752	5900	5881	5962	5991	6366	6728	6681	6842
Sumatera Barat	2041	2052	2085	2061	2180	2185	2348	2345	2480	2540	2582
Sumatera Selatan	3421	3553	3533	3465	3693	3696	3999	3943	3964	4013	4091
Bengkulu	816	874	860	832	869	904	965	933	988	1002	1032
Lampung	3737	3368	3517	3472	3673	3635	3931	3896	4060	4078	4280
Kep. Bangka Belitung	585	590	583	597	604	624	687	673	701	716	700
Kep. Riau	769	782	825	849	820	837	860	897	901	936	1017
DKI Jakarta	4690	4588	4839	4713	4634	4724	4862	4509	4727	4837	4559
Jawa Barat	16942	17408	18616	18732	19231	18791	19202	20552	20780	21902	21675
Jawa Tengah	15809	15883	16531	16470	16550	16435	16511	17187	17414	17603	17537

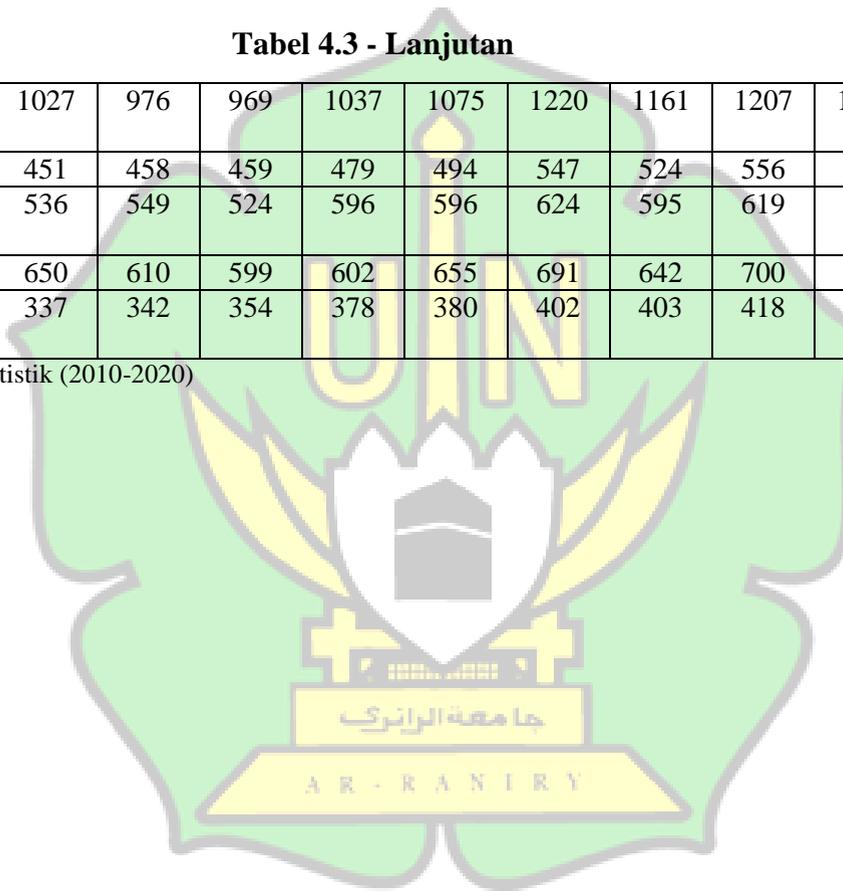
**Tabel 4.3 - Lanjutan**

DI Yogyakarta	1775	1799	1912	1886	1956	1891	2042	2053	2118	2135	2126
Jawa Timur	18698	18605	19411	19554	19307	19368	19115	20099	20450	20656	20963
Banten	4583	4530	4606	4637	4854	4825	5088	5077	5351	5552	5552
Bali	2177	2159	2252	2242	2273	2325	2417	2398	2526	2469	2423
NTB	2133	1974	2016	2032	2094	2128	2367	2317	2270	2522	2576
NTT	2061	2096	2096	2105	2174	2219	2277	2320	2412	2395	2726
Kalimantan Barat	2096	2147	2107	2054	2227	2236	2288	2303	2451	2369	2458
Kalimantan Tengah	1023	1106	1070	1064	1154	1215	1248	1222	1301	1328	1318
Kalimantan Selatan	1744	1788	1839	1831	1867	1890	1965	1975	2022	2037	2083
Kalimantan Timur	1482	1591	1619	1624	1677	1424	1581	1541	1618	1705	1693
Sulawesi Utara	937	991	957	947	981	1000	1111	1041	1095	1132	1135
Sulawesi Tengah	1164	1261	1230	1240	1293	1327	1327	1460	1480	1466	1516
Sulawesi Selatan	3272	3375	3352	3291	3527	3485	3695	3599	3775	3830	4007

**Tabel 4.3 - Lanjutan**

Sulawesi Tenggara	998	1027	976	969	1037	1075	1220	1161	1207	1218	1289
Gorontalo	433	451	458	459	479	494	547	524	556	562	569
Sulawesi Barat	515	536	549	524	596	596	624	595	619	642	673
Maluku	586	650	610	599	602	655	691	642	700	716	776
Papua Barat	317	337	342	354	378	380	402	403	418	433	459

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010-2020)



Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi dalam kurun waktu 11 tahun ditempati oleh provinsi Jawa Barat dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2019 adalah sebesar 21.902.958 juta orang. Sedangkan provinsi dengan jumlah penyerapan tenaga kerja terendah adalah provinsi Papua Barat yaitu sebesar 316.547 ribu orang pada tahun 2010. Tenaga kerja yang tidak dapat diserap salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja sehingga menyebabkan jumlah pengangguran meningkat.

#### **4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel bebas pada penelitian ini yang diukur dengan melihat perubahan dari tahun ke tahun data PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan tabel 4.2 dari 319 observasi diperoleh nilai rata-rata (*mean*) pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5.18 dengan pertumbuhan ekonomi maksimum sebesar 26.82 dan pertumbuhan ekonomi minimum sebesar -9.31. Sementara itu, standar deviasi pada pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini sebesar 3.15. Berikut data pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2020.

**Tabel 4.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2020**

<b>Provinsi</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aceh	1.29	3.28	3.85	2.61	1.55	-0.73	3.29	4.18	4.61	4.14	-0.74
Sumatera Utara	6.38	6.66	6.45	6.07	5.23	5.1	5.18	5.12	5.18	5.22	-1.07
Sumatera Barat	5.94	6.34	6.31	6.08	5.65	5.53	5.27	5.29	5.16	5.05	-1.6
Sumatera Selatan	5.43	6.36	6.83	5.31	4.7	4.42	5.04	5.51	6.04	5.71	-0.11
Bengkulu	5.14	6.85	6.83	6.07	5.48	5.13	5.28	4.98	4.99	4.96	-0.02
Lampung	5.75	6.56	6.44	5.77	5.08	5.13	5.14	5.16	5.25	5.27	-1.67
Kep. Bangka Belitung	5.85	6.9	5.5	5.2	4.67	4.08	4.1	4.47	4.45	3.32	-2.29
Kep. Riau	7.21	6.96	7.63	7.21	6.62	6.02	4.98	1.98	4.58	4.89	3.8
DKI Jakarta	6.51	6.73	6.53	6.07	5.91	5.91	5.87	6.2	6.17	5.89	-2.36
Jawa Barat	6.09	6.5	6.5	6.33	5.09	5.05	5.66	5.35	5.64	5.07	-2.44
Jawa Tengah	5.84	5.3	5.34	5.11	5.27	5.47	5.25	5.26	5.3	5.4	-2.65
DI Yogyakarta	4.87	5.21	5.37	5.47	5.17	4.95	5.05	5.26	6.2	6.6	-2.69

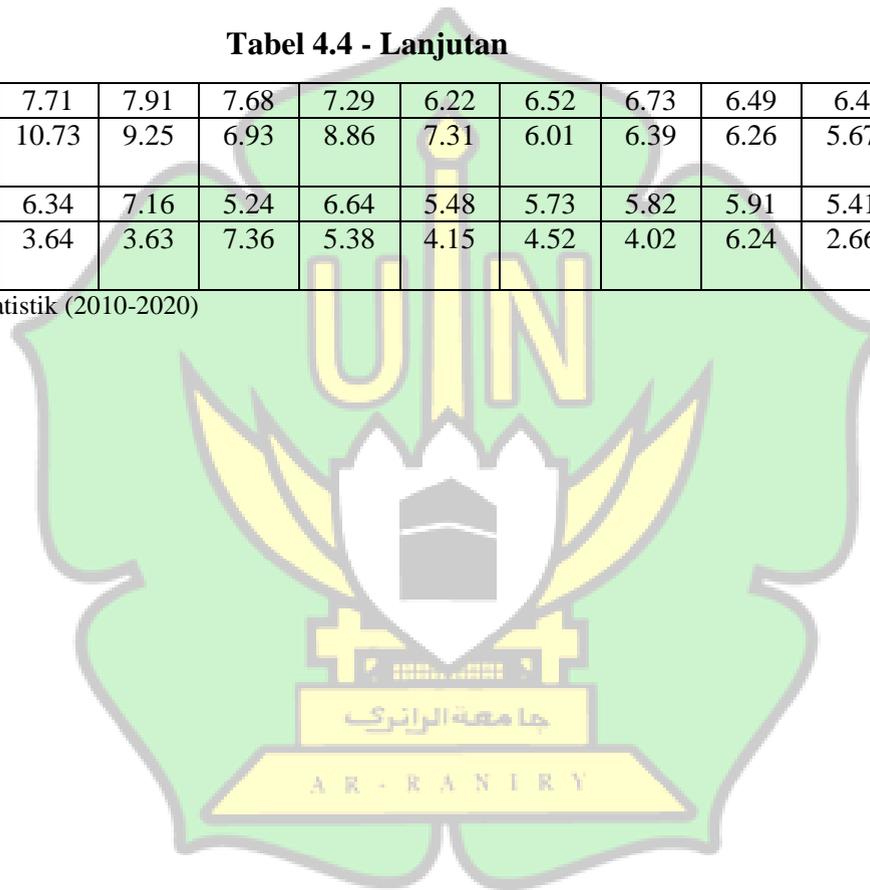
**Tabel 4.4 - Lanjutan**

Jawa Timur	6.68	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44	5.57	5.46	5.5	5.52	-2.39
Banten	5.94	7.03	6.83	6.67	5.51	5.45	5.28	5.73	5.81	5.29	-3.38
Bali	5.83	6.66	6.96	6.69	6.72	6.03	6.33	5.56	6.33	5.63	-9.31
NTB	6.11	-3.91	-1.54	5.16	5.17	21.76	5.81	0.09	-4.5	3.9	-0.64
NTT	5.13	5.67	5.46	5.41	5.05	4.92	5.12	5.11	5.13	5.2	-2.27
Kalimantan Barat	5.47	5.98	5.81	6.05	5.03	4.81	5.2	5.17	5.06	5	-1.82
Kalimantan Tengah	6.47	7.01	6.87	7.38	6.21	7.01	6.35	6.73	5.64	6.16	-1.4
Kalimantan Selatan	5.59	6.97	5.97	5.33	4.84	3.83	4.38	5.28	5.12	4.08	-1.81
Kalimantan Timur	4.95	6.47	5.48	2.76	1.71	-1.2	-0.38	3.13	2.67	4.77	2.85
Sulawesi Utara	7.16	6.17	6.86	6.38	6.31	6.12	6.16	6.31	6.01	5.66	-0.99
Sulawesi Tengah	8.74	9.82	9.53	9.59	5.07	5.5	9.94	7.1	6.3	7.15	4.86
Sulawesi Selatan	8.19	8.13	8.87	7.62	7.54	7.19	7.42	7.21	7.07	6.92	-0.7
Sulawesi Tenggara	8.22	10.63	11.65	7.5	6.26	6.88	6.51	6.76	6.42	6.51	-0.65

**Tabel 4.4 - Lanjutan**

Gorontalo	7.63	7.71	7.91	7.68	7.29	6.22	6.52	6.73	6.49	6.4	-0.02
Sulawesi Barat	11.89	10.73	9.25	6.93	8.86	7.31	6.01	6.39	6.26	5.67	-2.42
Maluku	6.47	6.34	7.16	5.24	6.64	5.48	5.73	5.82	5.91	5.41	-0.92
Papua Barat	26.82	3.64	3.63	7.36	5.38	4.15	4.52	4.02	6.24	2.66	-0.77

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010-2020)



Tabel 4.4 menunjukkan pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2020. Pada tahun 2010 sampai 2020 provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Papua Barat sebesar 26.82 persen pada tahun 2010 dan kemudian mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar -0.77 persen pada tahun 2020. Sedangkan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah adalah provinsi Bali yaitu sebesar -9.31 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi paling dominan di beberapa provinsi pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19.

#### **4.2.3 Upah Minimum**

Upah minimum merupakan variabel bebas pada penelitian ini. Pengukuran upah minimum provinsi didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Berdasarkan tabel 4.2 dari 319 sampel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) upah minimum provinsi adalah sebesar 14.255 Rupiah dan upah minimum provinsi maksimum sebesar 15.267 Rupiah. Sementara upah minimum provinsi minimum sebesar 13.353 Rupiah dan standar deviasi pada upah minimum provinsi dalam penelitian ini sebesar 0.414. Berikut data upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2010-2020.

**Tabel 4.5**  
**Upah Minimum Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2020**  
**(per 1000 unit)**

<b>Provinsi</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aceh	1300	1350	1400	1550	1750	1900	2119	2500	2718	2917	3165
Sumatera Utara	965	1036	1200	1375	1506	1625	1812	1961	2132	2303	2499
Sumatera Barat	940	1055	1150	1350	1490	1615	1801	1949	2119	2289	2484
Sumatera Selatan	928	1048	1195	1630	1825	1974	2206	2388	2596	2804	3043
Bengkulu	780	815	930	1200	1350	1500	1605	1730	1889	2040	2214
Lampung	768	855	975	1150	1399	1581	1763	1908	2075	2241	2431
Kep. Bangka Belitung	910	1024	1110	1265	1640	2100	2342	2535	2756	2977	3230
Kep. Riau	925	975	1015	1365	1665	1954	2179	2358	2564	2770	3005
DKI Jakarta	1118	1290	1529	2200	2441	2700	3100	3356	3648	3941	4267
Jawa Barat	672	732	780	850	1000	1000	2250	1421	1544	1668	1810
Jawa Tengah	660	675	765	830	910	910	1265	1367	1486	1605	1742

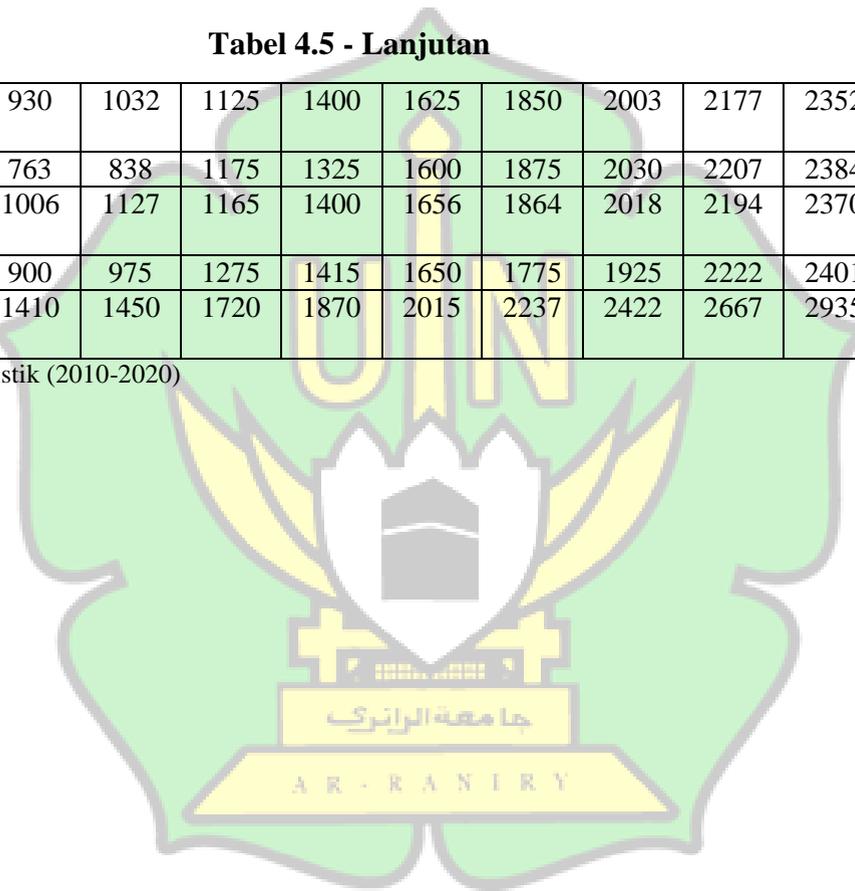
**Tabel 4.5 - Lanjutan**

DI Yogyakarta	746	808	893	947	989	989	1238	1338	1454	1571	1705
Jawa Timur	630	705	745	866	1000	1000	1273	1388	1509	1630	1769
Banten	955	1000	1042	1170	1325	1600	1784	1931	2099	2268	2461
Bali	829	890	967	1181	1543	1621	1807	1957	2127	2298	2494
NTB	891	950	1000	1100	1210	1330	1483	1631	1825	2013	2184
NTT	800	850	925	1010	1150	1250	1425	1525	1660	1793	1950
Kalimantan Barat	741	803	900	1060	1380	1560	1739	1883	2047	2212	1946
Kalimantan Tengah	987	1135	1327	1553	1724	1896	2058	2227	2421	2663	2903
Kalimantan Selatan	1025	1126	1225	1338	1620	1870	2086	2258	2455	2652	2877
Kalimantan Timur	1002	1084	1177	1752	1886	2026	2161	2355	2543	2748	2981
Sulawesi Utara	1000	1050	1250	1550	1900	2150	2400	2598	2842	3051	3311
Sulawesi Tengah	778	828	885	995	1250	1500	1670	1808	1965	2123	2304
Sulawesi Selatan	1000	1100	1200	1440	1800	2000	2250	2436	2648	2860	3104

**Tabel 4.5 - Lanjutan**

Sulawesi Tenggara	860	930	1032	1125	1400	1625	1850	2003	2177	2352	2552
Gorontalo	710	763	838	1175	1325	1600	1875	2030	2207	2384	2587
Sulawesi Barat	944	1006	1127	1165	1400	1656	1864	2018	2194	2370	2571
Maluku	840	900	975	1275	1415	1650	1775	1925	2222	2401	2605
Papua Barat	1210	1410	1450	1720	1870	2015	2237	2422	2667	2935	3135

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010-2020)



Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa upah minimum provinsi di Indonesia selalu mengalami kenaikan. Kenaikan upah minimum provinsi cenderung seimbang setiap tahunnya. Upah minimum provinsi ditetapkan untuk semua provinsi di Indonesia bertujuan untuk menyetarakan kebutuhan hidup masyarakat. Upah minimum provinsi tertinggi yang ditetapkan adalah upah minimum provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 4.659.251 dan provinsi yang memiliki upah minimum provinsi terendah adalah Jawa Timur pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 630.000.

#### **4.2.4 Inflasi**

Inflasi merupakan variabel bebas pada penelitian ini. Pengukuran inflasi didasarkan pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Berdasarkan tabel 4.2 dari 319 sampel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) inflasi adalah sebesar 4.52 dan inflasi maksimum sebesar 11.58. Sementara inflasi minimum sebesar -0.18 dan standar deviasi pada inflasi dalam penelitian ini sebesar 2.51. Berikut data inflasi di Indonesia tahun 2010-2020.

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Inflasi Di Indonesia Tahun 2010-2020**

<b>Provinsi</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aceh	5.86	3.43	0.22	7.31	8.09	1.53	3.95	4.25	1.84	1.69	3.59
Sumatera Utara	8	3.67	3.86	10.18	8.17	3.24	6.34	3.2	1.23	2.33	1.96
Sumatera Barat	7.84	5.37	4.16	10.87	11.58	1.08	4.89	2.02	2.6	1.66	2.11
Sumatera Selatan	6.02	3.78	2.72	7.04	8.48	3.1	3.58	2.96	2.74	2.06	1.55
Bengkulu	9.08	3.96	4.61	9.94	10.85	3.25	5	3.56	2.35	2.91	0.89
Lampung	9.95	4.42	4.3	7.56	8.36	4.65	2.75	3.02	2.73	3.44	2
Kep. Bangka Belitung	9.36	5	6.57	8.71	9.06	3.27	6.75	3.13	3.18	2.62	1.08
Kep. Riau	7.17	3.68	2.38	8.24	7.59	4.4	3.53	4.02	3.47	2.03	1.18
DKI Jakarta	6.21	3.97	4.52	8	8.95	3.3	2.37	3.72	3.27	3.23	1.59
Jawa Barat	6.62	3.1	3.86	9.15	7.41	2.73	2.75	3.63	3.54	3.21	2.18
Jawa Tengah	6.88	2.68	4.24	7.99	8.22	2.73	2.36	3.71	2.82	2.81	1.56
DI Yogyakarta	7.38	3.88	4.31	8.02	6.59	3.09	2.29	4.2	2.66	2.77	1.4

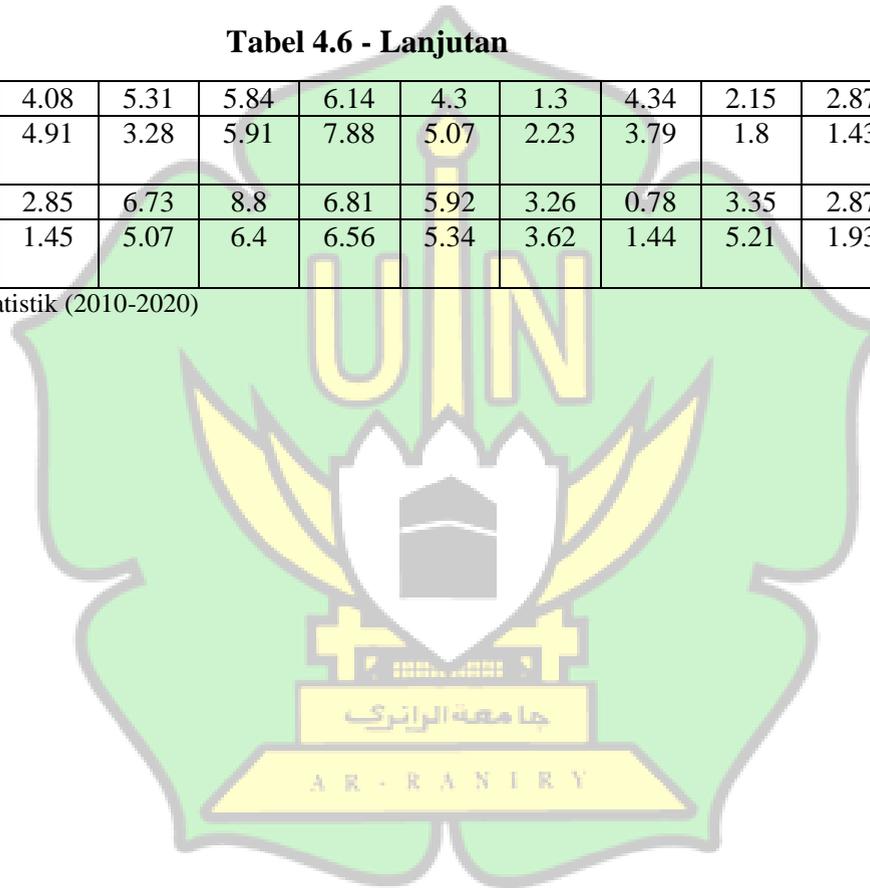
**Tabel 4.6 – Lanjutan**

Jawa Timur	6.96	4.09	4.5	7.59	7.77	3.08	2.72	4.04	2.86	2.12	1.44
Banten	6.1	3.45	4.37	9.65	10.2	4.29	2.94	3.98	3.42	3.3	1.45
Bali	8.1	3.75	4.71	7.34	8.43	2.75	3.23	3.32	3.13	2.38	0.8
NTB	10.08	6.55	3.99	9.51	7.23	3.41	2.61	3.7	3.16	1.87	0.6
NTT	9.73	4.68	5.33	8.41	7.76	4.92	2.48	2	3.07	0.67	0.61
Kalimantan Barat	5.75	4.3	6.19	9.48	9.38	6.17	3.88	3.86	3.99	2.37	2.46
Kalimantan Tengah	9.51	4.55	5.85	6.79	7.07	4.74	2.11	3.18	4.52	2.45	1.03
Kalimantan Selatan	9.06	3.98	5.96	6.98	7.28	5.14	3.57	3.73	2.63	4.01	1.68
Kalimantan Timur	7.28	6.35	5.6	9.65	7.66	4.89	3.39	3.15	3.24	1.66	0.78
Sulawesi Utara	6.28	0.67	6.04	8.12	9.67	5.56	0.35	2.44	3.83	3.52	-0.18
Sulawesi Tengah	6.4	4.47	5.87	7.57	8.85	4.17	1.49	4.33	6.46	2.3	1.62
Sulawesi Selatan	6.56	2.87	4.3	6.22	8.61	4.48	2.94	4.44	3.5	2.35	2.04
Sulawesi Tenggara	3.87	5.09	5.32	5.92	7.4	2.27	3.07	2.96	2.55	3.22	1.33

**Tabel 4.6 - Lanjutan**

Gorontalo	7.43	4.08	5.31	5.84	6.14	4.3	1.3	4.34	2.15	2.87	0.81
Sulawesi Barat	5.12	4.91	3.28	5.91	7.88	5.07	2.23	3.79	1.8	1.43	1.78
Maluku	8.78	2.85	6.73	8.8	6.81	5.92	3.26	0.78	3.35	2.87	0.21
Papua Barat	7.41	1.45	5.07	6.4	6.56	5.34	3.62	1.44	5.21	1.93	0.71

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010-2020)



Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia selama periode 2010-2020 mengalami tren yang cenderung fluktuatif. Selama tahun 2010 sampai 2020, inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2014 yang tercatat sebesar 11.58 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Utara pada tahun 2020 yang tercatat sebesar - 0.18 persen.

### **4.3 Analisis Data Inferensial**

#### **4.3.1 Penentuan Model Estimasi Inferensial**

Penentuan model estimasi dapat dilakukan dengan 3 uji yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*. Penggunaan uji tersebut dapat membantu memilih model terbaik yang akan digunakan. Berikut pengujian hipotesis pada pengujian masing-masing uji.

**Tabel 4.7**  
**Hipotesis Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier**

<b>Alat Pengujian</b>	<b>Hipotesis</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Keterangan</b>
Uji Chow	$H_0 =$ menggunakan <i>common effect model</i> .	Jika nilai p- <i>value</i> $> \alpha$ maka $H_0$ diterima.	Model yang digunakan adalah <i>common effect model</i> .
	$H_1 =$ menggunakan <i>fixed effect model</i> .	Jika nilai p- <i>value</i> $< \alpha$ maka $H_0$ ditolak.	Model yang digunakan adalah <i>fixed effect model</i> .
Uji Hausman	$H_0 =$ menggunakan <i>random effect model</i> .	Jika nilai p- <i>value</i> $> \alpha$ maka $H_0$ diterima.	Model yang digunakan adalah <i>random effect model</i> .
	$H_1 =$ menggunakan <i>fixed effect model</i> .	Jika nilai p- <i>value</i> $< \alpha$ maka $H_0$ ditolak.	Model yang digunakan adalah <i>fixed effect model</i> .

**Tabel 4.7 - Lanjutan**

Uji Lagrange Multiplier	H <sub>0</sub> = menggunakan <i>common effect</i> <i>model</i> atau <i>pooled least</i> <i>square</i> .	Jika nilai p- <i>value</i> > $\alpha$ maka H <sub>0</sub> diterima.	Model yang digunakan adalah <i>common effect</i> <i>model</i> .
	H <sub>1</sub> = menggunakan <i>random effect</i> <i>model</i> .	Jika nilai p- <i>value</i> < $\alpha$ maka H <sub>0</sub> ditolak.	Model yang digunakan adalah <i>random</i> <i>effect model</i> .

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data panel dengan menggunakan tiga model estimasi yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Untuk menentukan mana di antara tiga model tersebut yang paling tepat digunakan sebagai alat estimasi, maka digunakan uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier. Berikut tabel hasil pengujian ketiga-tiga uji tersebut.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier**

<b>Model Estimasi</b>	<b>Alat Penguji</b>	<b>P-Value</b>	<b>Model yang digunakan</b>
<i>Common effect model</i> atau <i>fixed effect model</i>	Uji Chow	0.000	<i>Fixed effect model</i>
<i>Random effect model</i> atau <i>fixed effect model</i>	Uji Hausman	0.0542	<i>Random effect model</i>
<i>Common effect model</i> atau <i>random effect model</i>	Uji Lagrange Multiplier	0.000	<i>Random effect model</i>

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai *p-value* pada uji Chow sebesar  $0.000 < 0.05$  maka dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya model *fixed effect* lebih baik dari model *common effect*. Pengujian Hausman menunjukkan nilai *p-value* sebesar  $0.0542 > 0.05$  sehingga  $H_0$  diterima. Hal ini menjelaskan bahwa regresi dengan model *random effect* lebih baik daripada regresi menggunakan model *fixed effect*. Nilai *p-value* pada pengujian Lagrange Multiplier sebesar  $0.000 < 0.05$ , maka

dapat dinyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya model *random effect* lebih baik daripada model *common effect*. Hasil pengujian Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier menunjukkan model terbaik yang dipilih adalah *random effect model*.

#### 4.3.2 Uji Kriteria Statistik (Uji Signifikansi)

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji t (uji parsial) dan uji f (uji simultan). Berikut hasil dari estimasi *random effect model*:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Estimasi Random Effect Model**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Stat	Prob.
C	12.48653	0.212570	58.74078	0.0000
PE	-6.99E-05	0.001077	-0.064962	0.9482
LOGUMP	0.146417	0.008036	18.22063	0.0000
INF	-0.004291	0.001123	-3.819489	0.0002
DUMMY	0.028758	0.010930	2.631078	0.0089
R-Squared	0.724770			
Prob(F-Stat)	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10 (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan pendekatan *random effect model* maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Uji Signifikansi Parsial
  - a. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki P-value 0.9482 > 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.00007. Uji ini

menunjukkan  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

- b. Variabel upah minimum memiliki *P-value*  $0.0000 < 0.05$  dengan nilai koefisien sebesar 0.146. Uji ini menunjukkan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
- c. Variabel inflasi memiliki *P-value*  $0.0002 < 0.05$  dengan nilai koefisien sebesar -0.004. Uji ini menunjukkan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
- d. Variabel *dummy* COVID-19 memiliki *P-value*  $0.0089 < 0.05$  dengan nilai koefisien sebesar 0.0287. Uji ini menunjukkan  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *dummy* COVID-19 dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

## 2. Uji Signifikansi Simultan

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.9 menunjukkan nilai *f*-statistik sebesar 206.7158 dengan probabilitas sebesar 0.000 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum,

inflasi dan *dummy* COVID-19 mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

#### 4.3.3 Analisis Regresi Data Panel

Setelah menentukan model estimasi terbaik sehingga terpilih model *random effect* maka selanjutnya analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan suatu model hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat yang digunakan untuk melihat arah hubungan, baik hubungan positif atau negatif dari masing-masing variabel. Selain itu, model ini dapat memprediksi nilai dari variabel terikat jika variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Penelitian ini menggunakan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebas menggunakan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19. Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$\text{LogPTK}=12.49-0.00007\text{PE}+0.15\text{LogUMP}-0.004\text{INF}+0.029\text{DM}+e$$

1. Nilai konstanta adalah sebesar 12.49 artinya jika variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19 dianggap konstan (tetap) maka nilai penyerapan tenaga kerja yang dilambangkan dengan Y adalah sebesar 12.49.
2. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0.00007. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi

berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.007% dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

3. Nilai koefisien upah minimum sebesar 0.15. Hal ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya setiap kenaikan upah minimum sebesar 1% akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 15% dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
4. Nilai koefisien inflasi sebesar -0.004. Hal ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.4% dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
5. Perubahan dari pengaruh variabel *dummy* sebelum dan pada saat COVID-19 signifikan yang dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0089 lebih kecil dari 0.05 sehingga *dummy* memiliki perbedaan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sebelum dan pada saat COVID-19 dengan nilai koefisien sebesar 0.029. Artinya setiap kenaikan *dummy* sebesar 1% akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.9% dari masa sebelum COVID-19.

## **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi  $0.9482 > 0.05$  sehingga  $H_0$  diterima yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan hasil koefisien sebesar  $-0.00007$ , hal ini menyatakan bahwa adanya pengaruh yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat akan menurunkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kumar (2017) bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi maka penyerapan tenaga kerja akan menurun dikarenakan banyaknya sektor ekonomi yang merekrut tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Tangerang. Sokian, Amir & Zamzami (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana setiap kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi jumlah pekerja di Kabupaten Sarolangun.

Menurut Wijaya, Indrawati & Pailis (2014) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dalam arah yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Rusniati, Sudarti & Agustin (2018) di mana penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan memiliki pengaruh yang positif. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Malang juga meningkat. Hasil ini diperkuat dengan teori Hukum *Okun* yang menyatakan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kemudian menurunkan angka pengangguran.

#### **4.4.2 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa upah minimum memiliki nilai signifikansi  $0.0000 < 0.05$  sehingga  $H_1$  diterima yang berarti bahwa upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan hasil koefisien sebesar 0.15, hal ini menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja. Apabila upah minimum meningkat maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Atiyatna, Nurlina & Soebyakto (2016) yang menunjukkan bahwa upah minimum

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan, di mana kenaikan upah minimum sebesar 1% akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Handayani, Saleh & Muslihatinningsih (2018) menemukan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Prawoto (2018) yang menyatakan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Ziyadaturrofiqoh, Zulfanetti & Safri (2015) upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

#### **4.4.3 Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa inflasi memiliki nilai signifikansi  $0.0002 < 0.05$  sehingga  $H_1$  diterima yang berarti bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan hasil koefisien sebesar 0.004, hal ini menyatakan bahwa adanya pengaruh yang negatif antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja. Apabila inflasi meningkat akan menurunkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prawoto (2018) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah tetapi dalam arah yang searah. Artinya peningkatan inflasi akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja. Shafira (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah karena tingkat inflasi tertinggi di Jawa Tengah masih dalam intensitas ringan.

Penelitian yang dilakukan oleh Warapsari, Hidayat & Boedirochminarni (2020) menunjukkan hasil yang berbeda apabila variabel inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Penyerapan tenaga kerja lebih dominan dipengaruhi oleh PDRB dan upah minimum.

#### **4.4.4 Pengaruh *Dummy* COVID-19 Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa *dummy* COVID-19 memiliki nilai signifikansi  $0.0089 < 0.05$  sehingga  $H_1$  diterima yang berarti bahwa *dummy* COVID-19 berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan hasil koefisien sebesar 0.029, hal ini menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara *dummy* COVID-19 dengan penyerapan tenaga kerja. Apabila *dummy* COVID-19 meningkat maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Tetapi, penelitian ini hanya mengambil satu

tahun sejak munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *dummy* COVID-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19 terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi secara parsial mempunyai hubungan yang negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar  $-0.00007$ . Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia menurun sebesar  $0.007\%$ .
2. Upah minimum secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar  $0.15$ . Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar satu persen akan menyebabkan jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia meningkat sebesar  $15\%$ .
3. Inflasi secara parsial mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar  $-0.004$ . Hasil ini menunjukkan jika tingkat inflasi meningkat sebesar satu persen maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan menurun sebesar  $0.4\%$ .

4. *Dummy* COVID-19 mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia sehingga terdapat perbedaan jumlah tenaga kerja yang diserap sebelum dan pada saat COVID-19. Nilai koefisien sebesar 0.029 menunjukkan bahwa kenaikan *dummy* COVID-19 sebesar satu persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 2.9% dari masa sebelum COVID-19.
5. Hasil uji signifikansi simultan (uji f) menyatakan bahwa secara simultan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Inflasi dan *dummy* COVID-19 terhadap variabel dependen yaitu Penyerapan Tenaga Kerja. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.724770, artinya 72.50% variasi variabel penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variasi variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19. Sedangkan sisanya 27.5% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia adalah upah minimum, inflasi dan *dummy* COVID-19. Dengan demikian, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus mendorong sektor ekonomi yang lebih luas untuk menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan dan memprioritaskan sektor-sektor yang berpotensi untuk menyerap tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Pemerintah harus adil dalam menetapkan upah minimum dan melakukan pemantauan terhadap implementasi upah minimum agar dapat menciptakan pasar tenaga kerja yang seimbang dan mendorong lebih banyak jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Pemerintah harus mempertahankan tingkat inflasi yang ideal dan menjaga stabilitas tingkat inflasi ketika melakukan pengeluaran untuk mengembangkan sektor ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengatur tingkat inflasi tetapi tetap dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.
4. Indonesia harus mengawal dan memperkuat kondisi perekonomian dalam negara agar tidak berdampak terlalu kuat disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bukan sahaja menyebabkan krisis kesehatan tetapi juga menyebabkan aktivitas perekonomian menjadi terbatas sehingga banyak perusahaan terpaksa membatasi jumlah tenaga kerja yang dapat diserap dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. *Makroekonomi Edisi Pertama, Macroeconomics 1st Edition*. Terjemahan Devri Barnadi Putera, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Atiyatna, D. P., Nurlina, T. M., & Soebyakto, B. B.. (2016). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 14(1).
- Chusna, Arifatul. (2013). *Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011*. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Handayani, C. M., Saleh, M. & Muslihatinningsih, F. (2018). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember Tahun 2001-2015. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*. 2(1).
- Hasyim, A.I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Karya, D. & Syamsuddin, S. (2016). *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kumar, K. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2009-2015. *Jurnal Bisnis & Manajemen*. 17(1).
- Latumaerisa, J. R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, dkk. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

- Maryati, S., Handra, H., & Muslim, I. (2021). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 21(1).
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. 15(1).
- Mulyadi, S. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan Edisi Revisi 5*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pambudi, W. (2013). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Prawoto, D. A. (2018). *Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2011-2015*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rivai, dkk. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusniati, R., Sudarti, & Agustin, A. F. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 3(2).
- Sari, S. W. (2015). *Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*. Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

- Shafira, A. (2020). *Pengaruh PDRB, Upah Minimum dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2018*. Yogyakarta: Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
- Silalahi, R. dkk. (2013). *Teori Ekonomi Makro*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Sokian, M., Amir, A., & Zamzami. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 15(2).
- Subanti, S. & Arif R. H. (2014). *Ekonometri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suharyadi, Purwanto S.K. (2015). *STATISTIKA: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparmoko, M. & Sofilda, E. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro*. Tangerang: CV. Wacana Mulia.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Warapsari, E. B., Hidayat, W., & Boedirochminarni, A. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 4(2).

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wijaya, A., Indrawati, T., & Pailis, E. A. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Riau. *Jurnal FEKOM*. 1(2).

Yusuf, B. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ziyadaturrofiqoh, Zulfanetti, & Safri, M. (2018). Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. 7(1).



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Analisis Data Regresi Panel

Tahun	Provinsi	Penyerapan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Upah Minimum Provinsi	Inflasi	Dummy
2010	Aceh	1776254	1.29	1300000	5.86	0
2011	Aceh	1852473	3.28	1350000	3.43	0
2012	Aceh	1798547	3.85	1400000	0.22	0
2013	Aceh	1824586	2.61	1550000	7.31	0
2014	Aceh	1931823	1.55	1750000	8.09	0
2015	Aceh	1966018	-0.73	1900000	1.53	0
2016	Aceh	2087045	3.29	2118500	3.95	0
2017	Aceh	2138512	4.18	2500000	4.25	0
2018	Aceh	2203717	4.61	2717750	1.84	0
2019	Aceh	2219698	4.14	2916810	1.69	0
2020	Aceh	2359905	-0.74	3165030	3.59	1
2010	Sumatera Utara	6125571	6.38	965000	8	0
2011	Sumatera Utara	5912114	6.66	1035500	3.67	0

2012	Sumatera Utara	5751682	6.45	1200000	3.86	0
2013	Sumatera Utara	5899566	6.07	1375000	10.18	0
2014	Sumatera Utara	5881371	5.23	1505850	8.17	0
2015	Sumatera Utara	5962304	5.1	1625000	3.24	0
2016	Sumatera Utara	5991229	5.18	1811875	6.34	0
2017	Sumatera Utara	6365989	5.12	1961355	3.2	0
2018	Sumatera Utara	6728431	5.18	2132189	1.23	0
2019	Sumatera Utara	6681224	5.22	2303403	2.33	0
2020	Sumatera Utara	6842252	-1.07	2499422	1.96	1
2010	Sumatera Barat	2041454	5.94	940000	7.84	0
2011	Sumatera Barat	2051696	6.34	1055000	5.37	0
2012	Sumatera Barat	2085483	6.31	1150000	4.16	0
2013	Sumatera Barat	2061109	6.08	1350000	10.87	0
2014	Sumatera Barat	2180336	5.65	1490000	11.58	0
2015	Sumatera Barat	2184599	5.53	1615000	1.08	0
2016	Sumatera Barat	2347911	5.27	1800725	4.89	0
2017	Sumatera Barat	2344972	5.29	1949284	2.02	0
2018	Sumatera Barat	2480405	5.16	2119067	2.6	0
2019	Sumatera Barat	2540040	5.05	2289228	1.66	0
2020	Sumatera Barat	2581524	-1.6	2484041	2.11	1

2010	Sumatera Selatan	3421193	5.43	927825	6.02	0
2011	Sumatera Selatan	3553104	6.36	1048440	3.78	0
2012	Sumatera Selatan	3532932	6.83	1195220	2.72	0
2013	Sumatera Selatan	3464620	5.31	1630000	7.04	0
2014	Sumatera Selatan	3692806	4.7	1825000	8.48	0
2015	Sumatera Selatan	3695866	4.42	1974346	3.1	0
2016	Sumatera Selatan	3998637	5.04	2206000	3.58	0
2017	Sumatera Selatan	3942534	5.51	2388000	2.96	0
2018	Sumatera Selatan	3963870	6.04	2595995	2.74	0
2019	Sumatera Selatan	4012611	5.71	2804453	2.06	0
2020	Sumatera Selatan	4091383	-0.11	3043111	1.55	1
2010	Bengkulu	815741	5.14	780000	9.08	0
2011	Bengkulu	873719	6.85	815000	3.96	0
2012	Bengkulu	859858	6.83	930000	4.61	0
2013	Bengkulu	832048	6.07	1200000	9.94	0
2014	Bengkulu	868794	5.48	1350000	10.85	0
2015	Bengkulu	904317	5.13	1500000	3.25	0
2016	Bengkulu	964971	5.28	1605000	5	0
2017	Bengkulu	932976	4.98	1730000	3.56	0
2018	Bengkulu	987914	4.99	1888741	2.35	0

2019	Bengkulu	1002161	4.96	2040000	2.91	0
2020	Bengkulu	1031881	-0.02	2213604	0.89	1
2010	Lampung	3737078	5.75	767500	9.95	0
2011	Lampung	3368486	6.56	855000	4.42	0
2012	Lampung	3516856	6.44	975000	4.3	0
2013	Lampung	3471602	5.77	1150000	7.56	0
2014	Lampung	3673158	5.08	1399037	8.36	0
2015	Lampung	3635258	5.13	1581000	4.65	0
2016	Lampung	3931321	5.14	1763000	2.75	0
2017	Lampung	3896230	5.16	1908447	3.02	0
2018	Lampung	4060377	5.25	2074673	2.73	0
2019	Lampung	4077930	5.27	2240646	3.44	0
2020	Lampung	4280109	-1.67	2431324	2	1
2010	Kepulauan Bangka Belitung	585136	5.85	910000	9.36	0
2011	Kepulauan Bangka Belitung	589634	6.9	1024000	5	0
2012	Kepulauan Bangka Belitung	583102	5.5	1110000	6.57	0
2013	Kepulauan Bangka Belitung	596786	5.2	1265000	8.71	0
2014	Kepulauan Bangka Belitung	604223	4.67	1640000	9.06	0
2015	Kepulauan Bangka Belitung	623949	4.08	2100000	3.27	0
2016	Kepulauan Bangka Belitung	686830	4.1	2341500	6.75	0

2017	Kepulauan Bangka Belitung	672618	4.47	2534673	3.13	0
2018	Kepulauan Bangka Belitung	701366	4.45	2755443	3.18	0
2019	Kepulauan Bangka Belitung	715927	3.32	2976705	2.62	0
2020	Kepulauan Bangka Belitung	699881	-2.29	3230022	1.08	1
2010	Kepulauan Riau	769486	7.21	925000	7.17	0
2011	Kepulauan Riau	781824	6.96	975000	3.68	0
2012	Kepulauan Riau	824567	7.63	1015000	2.38	0
2013	Kepulauan Riau	848660	7.21	1365087	8.24	0
2014	Kepulauan Riau	819656	6.62	1665000	7.59	0
2015	Kepulauan Riau	836670	6.02	1954000	4.4	0
2016	Kepulauan Riau	859813	4.98	2178710	3.53	0
2017	Kepulauan Riau	896931	1.98	2358455	4.02	0
2018	Kepulauan Riau	901019	4.58	2563875	3.47	0
2019	Kepulauan Riau	935682	4.89	2769754	2.03	0
2020	Kepulauan Riau	1016600	3.8	3005460	1.18	1
2010	DKI Jakarta	4689761	6.51	1118009	6.21	0
2011	DKI Jakarta	4588418	6.73	1290000	3.97	0
2012	DKI Jakarta	4838596	6.53	1529150	4.52	0
2013	DKI Jakarta	4712836	6.07	2200000	8	0
2014	DKI Jakarta	4634369	5.91	2441000	8.95	0

2015	DKI Jakarta	4724029	5.91	2700000	3.3	0
2016	DKI Jakarta	4861832	5.87	3100000	2.37	0
2017	DKI Jakarta	4509171	6.2	3355750	3.72	0
2018	DKI Jakarta	4726779	6.17	3648035	3.27	0
2019	DKI Jakarta	4836977	5.89	3940973	3.23	0
2020	DKI Jakarta	4659251	-2.36	4267349	1.59	1
2010	Jawa Barat	16942444	6.09	671500	6.62	0
2011	Jawa Barat	17407516	6.5	732000	3.1	0
2012	Jawa Barat	18615753	6.5	780000	3.86	0
2013	Jawa Barat	18731943	6.33	850000	9.15	0
2014	Jawa Barat	19230943	5.09	1000000	7.41	0
2015	Jawa Barat	18791482	5.05	1000000	2.73	0
2016	Jawa Barat	19202038	5.66	2250000	2.75	0
2017	Jawa Barat	20551575	5.35	1420624	3.63	0
2018	Jawa Barat	20779888	5.64	1544360	3.54	0
2019	Jawa Barat	21902958	5.07	1668372	3.21	0
2020	Jawa Barat	21674854	-2.44	1810350	2.18	1
2010	Jawa Tengah	15809447	5.84	660000	6.88	0
2011	Jawa Tengah	15882765	5.3	675000	2.68	0
2012	Jawa Tengah	16531395	5.34	765000	4.24	0

2013	Jawa Tengah	16469960	5.11	830000	7.99	0
2014	Jawa Tengah	16550682	5.27	910000	8.22	0
2015	Jawa Tengah	16435142	5.47	910000	2.73	0
2016	Jawa Tengah	16511136	5.25	1265000	2.36	0
2017	Jawa Tengah	17186674	5.26	1367000	3.71	0
2018	Jawa Tengah	17413869	5.3	1486065	2.82	0
2019	Jawa Tengah	17602917	5.4	1605396	2.81	0
2020	Jawa Tengah	17536935	-2.65	1742015	1.56	1
2010	DI Yogyakarta	1775148	4.87	745694	7.38	0
2011	DI Yogyakarta	1798595	5.21	808000	3.88	0
2012	DI Yogyakarta	1911720	5.37	892660	4.31	0
2013	DI Yogyakarta	1886071	5.47	947114	8.02	0
2014	DI Yogyakarta	1956043	5.17	988500	6.59	0
2015	DI Yogyakarta	1891218	4.95	988500	3.09	0
2016	DI Yogyakarta	2042400	5.05	1237700	2.29	0
2017	DI Yogyakarta	2053168	5.26	1337645	4.2	0
2018	DI Yogyakarta	2118392	6.2	1454154	2.66	0
2019	DI Yogyakarta	2134750	6.6	1570923	2.77	0
2020	DI Yogyakarta	2126316	-2.69	1704608	1.4	1
2010	Jawa Timur	18698108	6.68	630000	6.96	0

2011	Jawa Timur	18604866	6.44	705000	4.09	0
2012	Jawa Timur	19411256	6.64	745000	4.5	0
2013	Jawa Timur	19553910	6.08	866250	7.59	0
2014	Jawa Timur	19306508	5.86	1000000	7.77	0
2015	Jawa Timur	19367777	5.44	1000000	3.08	0
2016	Jawa Timur	19114563	5.57	1273490	2.72	0
2017	Jawa Timur	20099220	5.46	1388000	4.04	0
2018	Jawa Timur	20449949	5.5	1508894	2.86	0
2019	Jawa Timur	20655632	5.52	1630059	2.12	0
2020	Jawa Timur	20962967	-2.39	1768777	1.44	1
2010	Banten	4583085	5.94	955300	6.1	0
2011	Banten	4529660	7.03	1000000	3.45	0
2012	Banten	4605847	6.83	1042000	4.37	0
2013	Banten	4637019	6.67	1170000	9.65	0
2014	Banten	4853992	5.51	1325000	10.2	0
2015	Banten	4825460	5.45	1600000	4.29	0
2016	Banten	5088497	5.28	1784000	2.94	0
2017	Banten	5077400	5.73	1931180	3.98	0
2018	Banten	5351110	5.81	2099385	3.42	0
2019	Banten	5552454	5.29	2267990	3.3	0

2020	Banten	5552172	-3.38	2460996	1.45	1
2010	Bali	2177358	5.83	829316	8.1	0
2011	Bali	2159158	6.66	890000	3.75	0
2012	Bali	2252475	6.96	967500	4.71	0
2013	Bali	2242076	6.69	1181000	7.34	0
2014	Bali	2272632	6.72	1542600	8.43	0
2015	Bali	2324805	6.03	1621172	2.75	0
2016	Bali	2416555	6.33	1807600	3.23	0
2017	Bali	2398307	5.56	1956727	3.32	0
2018	Bali	2525707	6.33	2127157	3.13	0
2019	Bali	2469006	5.63	2297969	2.38	0
2020	Bali	2423419	-9.31	2493523	0.8	1
2010	Nusa Tenggara Barat	2132933	6.11	890775	10.08	0
2011	Nusa Tenggara Barat	1974093	-3.91	950000	6.55	0
2012	Nusa Tenggara Barat	2015699	-1.54	1000000	3.99	0
2013	Nusa Tenggara Barat	2032282	5.16	1100000	9.51	0
2014	Nusa Tenggara Barat	2094100	5.17	1210000	7.23	0
2015	Nusa Tenggara Barat	2127503	21.76	1330000	3.41	0
2016	Nusa Tenggara Barat	2367310	5.81	1482950	2.61	0
2017	Nusa Tenggara Barat	2316720	0.09	1631245	3.7	0

2018	Nusa Tenggara Barat	2269580	-4.5	1825000	3.16	0
2019	Nusa Tenggara Barat	2522114	3.9	2012610	1.87	0
2020	Nusa Tenggara Barat	2575956	-0.64	2183883	0.6	1
2010	Nusa Tenggara Timur	2061229	5.13	800000	9.73	0
2011	Nusa Tenggara Timur	2096259	5.67	850000	4.68	0
2012	Nusa Tenggara Timur	2095683	5.46	925000	5.33	0
2013	Nusa Tenggara Timur	2104507	5.41	1010000	8.41	0
2014	Nusa Tenggara Timur	2174228	5.05	1150000	7.76	0
2015	Nusa Tenggara Timur	2219291	4.92	1250000	4.92	0
2016	Nusa Tenggara Timur	2277068	5.12	1425000	2.48	0
2017	Nusa Tenggara Timur	2320061	5.11	1525000	2	0
2018	Nusa Tenggara Timur	2411533	5.13	1660000	3.07	0
2019	Nusa Tenggara Timur	2394673	5.2	1793293	0.67	0
2020	Nusa Tenggara Timur	2725955	-2.27	1950000	0.61	1
2010	Kalimantan Barat	2095705	5.47	741000	5.75	0
2011	Kalimantan Barat	2146572	5.98	802500	4.3	0
2012	Kalimantan Barat	2106514	5.81	900000	6.19	0
2013	Kalimantan Barat	2053823	6.05	1060000	9.48	0
2014	Kalimantan Barat	2226510	5.03	1380000	9.38	0
2015	Kalimantan Barat	2235887	4.81	1560000	6.17	0

2016	Kalimantan Barat	2287823	5.2	1739400	3.88	0
2017	Kalimantan Barat	2303198	5.17	1882900	3.86	0
2018	Kalimantan Barat	2451399	5.06	2046900	3.99	0
2019	Kalimantan Barat	2369015	5	2211500	2.37	0
2020	Kalimantan Barat	2458296	-1.82	1945902	2.46	1
2010	Kalimantan Tengah	1022580	6.47	986590	9.51	0
2011	Kalimantan Tengah	1105701	7.01	1134580	4.55	0
2012	Kalimantan Tengah	1070210	6.87	1327459	5.85	0
2013	Kalimantan Tengah	1063711	7.38	1553127	6.79	0
2014	Kalimantan Tengah	1154489	6.21	1723970	7.07	0
2015	Kalimantan Tengah	1214681	7.01	1896367	4.74	0
2016	Kalimantan Tengah	1248189	6.35	2057558	2.11	0
2017	Kalimantan Tengah	1222707	6.73	2227307	3.18	0
2018	Kalimantan Tengah	1301002	5.64	2421305	4.52	0
2019	Kalimantan Tengah	1327885	6.16	2663435	2.45	0
2020	Kalimantan Tengah	1318133	-1.4	2903144	1.03	1
2010	Kalimantan Selatan	1743622	5.59	1024500	9.06	0
2011	Kalimantan Selatan	1787638	6.97	1126000	3.98	0
2012	Kalimantan Selatan	1839386	5.97	1225000	5.96	0
2013	Kalimantan Selatan	1830813	5.33	1337500	6.98	0

2014	Kalimantan Selatan	1867462	4.84	1620000	7.28	0
2015	Kalimantan Selatan	1889502	3.83	1870000	5.14	0
2016	Kalimantan Selatan	1965088	4.38	2085050	3.57	0
2017	Kalimantan Selatan	1975161	5.28	2258000	3.73	0
2018	Kalimantan Selatan	2021666	5.12	2454671	2.63	0
2019	Kalimantan Selatan	2036736	4.08	2651781	4.01	0
2020	Kalimantan Selatan	2083319	-1.81	2877447	1.68	1
2010	Kalimantan Timur	1481898	4.95	1002000	7.28	0
2011	Kalimantan Timur	1591003	6.47	1084000	6.35	0
2012	Kalimantan Timur	1619118	5.48	1177000	5.6	0
2013	Kalimantan Timur	1624272	2.76	1752073	9.65	0
2014	Kalimantan Timur	1677466	1.71	1886315	7.66	0
2015	Kalimantan Timur	1423957	-1.2	2026126	4.89	0
2016	Kalimantan Timur	1581239	-0.38	2161253	3.39	0
2017	Kalimantan Timur	1540675	3.13	2354800	3.15	0
2018	Kalimantan Timur	1618285	2.67	2543331	3.24	0
2019	Kalimantan Timur	1704808	4.77	2747561	1.66	0
2020	Kalimantan Timur	1692796	2.85	2981378	0.78	1
2010	Sulawesi Utara	936939	7.16	1000000	6.28	0
2011	Sulawesi Utara	990720	6.17	1050000	0.67	0

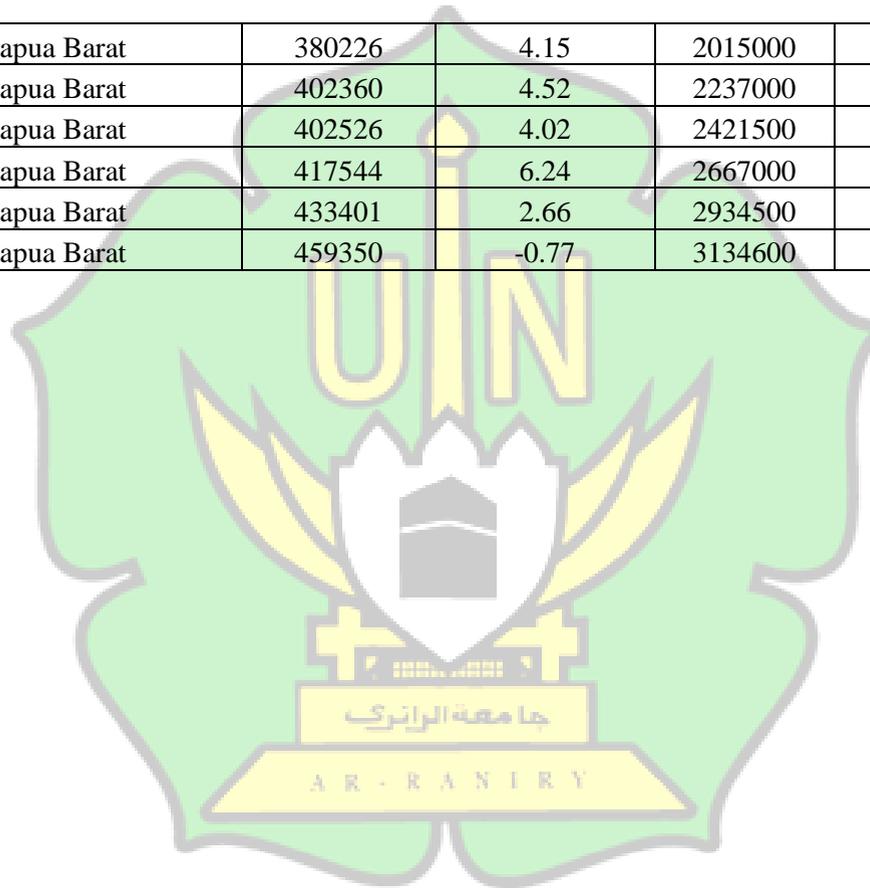
2012	Sulawesi Utara	957292	6.86	1250000	6.04	0
2013	Sulawesi Utara	946852	6.38	1550000	8.12	0
2014	Sulawesi Utara	980756	6.31	1900000	9.67	0
2015	Sulawesi Utara	1000000	6.12	2150000	5.56	0
2016	Sulawesi Utara	1110564	6.16	2400000	0.35	0
2017	Sulawesi Utara	1040826	6.31	2598000	2.44	0
2018	Sulawesi Utara	1095145	6.01	2824286	3.83	0
2019	Sulawesi Utara	1131521	5.66	3051076	3.52	0
2020	Sulawesi Utara	1134802	-0.99	3310723	-0.18	1
2010	Sulawesi Tengah	1164226	8.74	777500	6.4	0
2011	Sulawesi Tengah	1260999	9.82	827500	4.47	0
2012	Sulawesi Tengah	1229597	9.53	885000	5.87	0
2013	Sulawesi Tengah	1239122	9.59	995000	7.57	0
2014	Sulawesi Tengah	1293226	5.07	1250000	8.85	0
2015	Sulawesi Tengah	1327418	5.5	1500000	4.17	0
2016	Sulawesi Tengah	1327418	9.94	1670000	1.49	0
2017	Sulawesi Tengah	1459803	7.1	1807775	4.33	0
2018	Sulawesi Tengah	1479962	6.3	1965232	6.46	0
2019	Sulawesi Tengah	1466042	7.15	2123040	2.3	0
2020	Sulawesi Tengah	1516347	4.86	2303710	1.62	1

2010	Sulawesi Selatan	3272365	8.19	1000000	6.56	0
2011	Sulawesi Selatan	3375498	8.13	1100000	2.87	0
2012	Sulawesi Selatan	3351908	8.87	1200000	4.3	0
2013	Sulawesi Selatan	3291280	7.62	1440000	6.22	0
2014	Sulawesi Selatan	3527036	7.54	1800000	8.61	0
2015	Sulawesi Selatan	3485492	7.19	2000000	4.48	0
2016	Sulawesi Selatan	3694712	7.42	2250000	2.94	0
2017	Sulawesi Selatan	3598663	7.21	2435625	4.44	0
2018	Sulawesi Selatan	3774924	7.07	2647767	3.5	0
2019	Sulawesi Selatan	3830096	6.92	2860382	2.35	0
2020	Sulawesi Selatan	4006620	-0.7	3103800	2.04	1
2010	Sulawesi Tenggara	997678	8.22	860000	3.87	0
2011	Sulawesi Tenggara	1026548	10.63	930000	5.09	0
2012	Sulawesi Tenggara	975879	11.65	1032300	5.32	0
2013	Sulawesi Tenggara	968949	7.5	1125207	5.92	0
2014	Sulawesi Tenggara	1037419	6.26	1400000	7.4	0
2015	Sulawesi Tenggara	1074916	6.88	1625000	2.27	0
2016	Sulawesi Tenggara	1219548	6.51	1850000	3.07	0
2017	Sulawesi Tenggara	1160974	6.76	2002625	2.96	0
2018	Sulawesi Tenggara	1207488	6.42	2177052	2.55	0

2019	Sulawesi Tenggara	1217983	6.51	2351870	3.22	0
2020	Sulawesi Tenggara	1289232	-0.65	2552014	1.33	1
2010	Gorontalo	432926	7.63	710000	7.43	0
2011	Gorontalo	450767	7.71	762500	4.08	0
2012	Gorontalo	458409	7.91	837500	5.31	0
2013	Gorontalo	458930	7.68	1175000	5.84	0
2014	Gorontalo	479137	7.29	1325000	6.14	0
2015	Gorontalo	493687	6.22	1600000	4.3	0
2016	Gorontalo	546668	6.52	1875000	1.3	0
2017	Gorontalo	524316	6.73	2030000	4.34	0
2018	Gorontalo	555533	6.49	2206813	2.15	0
2019	Gorontalo	562087	6.4	2384020	2.87	0
2020	Gorontalo	568563	-0.02	2586900	0.81	1
2010	Sulawesi Barat	514867	11.89	944200	5.12	0
2011	Sulawesi Barat	536048	10.73	1006000	4.91	0
2012	Sulawesi Barat	548783	9.25	1127000	3.28	0
2013	Sulawesi Barat	523960	6.93	1165000	5.91	0
2014	Sulawesi Barat	595797	8.86	1400000	7.88	0
2015	Sulawesi Barat	595905	7.31	1655500	5.07	0
2016	Sulawesi Barat	624182	6.01	1864000	2.23	0

2017	Sulawesi Barat	595004	6.39	2017780	3.79	0
2018	Sulawesi Barat	619395	6.26	2193530	1.8	0
2019	Sulawesi Barat	641613	5.67	2369670	1.43	0
2020	Sulawesi Barat	672986	-2.42	2571328	1.78	1
2010	Maluku	586430	6.47	840000	8.78	0
2011	Maluku	650112	6.34	900000	2.85	0
2012	Maluku	610362	7.16	975000	6.73	0
2013	Maluku	598792	5.24	1275000	8.8	0
2014	Maluku	601651	6.64	1415000	6.81	0
2015	Maluku	655063	5.48	1650000	5.92	0
2016	Maluku	690786	5.73	1775000	3.26	0
2017	Maluku	642061	5.82	1925000	0.78	0
2018	Maluku	700143	5.91	2222220	3.35	0
2019	Maluku	715811	5.41	2400664	2.87	0
2020	Maluku	775701	-0.92	2604960	0.21	1
2010	Papua Barat	316547	26.82	1210000	7.41	0
2011	Papua Barat	336588	3.64	1410000	1.45	0
2012	Papua Barat	341741	3.63	1450000	5.07	0
2013	Papua Barat	353619	7.36	1720000	6.4	0
2014	Papua Barat	378436	5.38	1870000	6.56	0

2015	Papua Barat	380226	4.15	2015000	5.34	0
2016	Papua Barat	402360	4.52	2237000	3.62	0
2017	Papua Barat	402526	4.02	2421500	1.44	0
2018	Papua Barat	417544	6.24	2667000	5.21	0
2019	Papua Barat	433401	2.66	2934500	1.93	0
2020	Papua Barat	459350	-0.77	3134600	0.71	1



## Lampiran 2

### Hasil Uji *Common Effect Model*

Dependent Variable: LOGPTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/12/21 Time: 16:04

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 319

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.50139	2.390218	10.66906	0.0000
PE	-0.073797	0.023512	-3.138652	0.0019
LOGUMP	-0.720540	0.162279	-4.440143	0.0000
INF	-0.060225	0.026544	-2.268897	0.0240
DUMMY	-0.214679	0.262787	-0.816932	0.4146
R-squared	0.076978	Mean dependent var	14.55655	
Adjusted R-squared	0.065219	S.D. dependent var	1.024608	
S.E. of regression	0.990633	Akaike info criterion	2.834604	
Sum squared resid	308.1448	Schwarz criterion	2.893619	
Log likelihood	-447.1193	Hannan-Quinn criter.	2.858172	
F-statistic	6.546690	Durbin-Watson stat	0.078279	
Prob(F-statistic)	0.000045			

### Lampiran 3

#### Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOGPTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/12/21 Time: 16:05

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 319

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.48332	0.118595	105.2601	0.0000
PE	-5.27E-05	0.001077	-0.048906	0.9610
LOGUMP	0.146631	0.008036	18.24649	0.0000
INF	-0.004277	0.001123	-3.807171	0.0002
DUMMY	0.028812	0.010930	2.635950	0.0088

#### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998668	Mean dependent var	14.55655
Adjusted R-squared	0.998519	S.D. dependent var	1.024608
S.E. of regression	0.039426	Akaike info criterion	-3.531077
Sum squared resid	0.444565	Schwarz criterion	-3.141575
Log likelihood	596.2068	Hannan-Quinn criter.	-3.375525
F-statistic	6702.628	Durbin-Watson stat	1.222144
Prob(F-statistic)	0.000000		

## Lampiran 4

### Hasil Uji *Random Effect Model*

Dependent Variable: LOGPTK

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/12/21 Time: 16:06

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 319

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.48653	0.212570	58.74078	0.0000
PE	-6.99E-05	0.001077	-0.064962	0.9482
LOGUMP	0.146417	0.008036	18.22063	0.0000
INF	-0.004291	0.001123	-3.819489	0.0002
DUMMY	0.028758	0.010930	2.631078	0.0089
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.950027	0.9983
Idiosyncratic random			0.039426	0.0017
Weighted Statistics				
R-squared	0.724770	Mean dependent var		0.182128
Adjusted R-squared	0.721264	S.D. dependent var		0.075422
S.E. of regression	0.039819	Sum squared resid		0.497870
F-statistic	206.7158	Durbin-Watson stat		1.091724
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.021288	Mean dependent var		14.55655
Sum squared resid	340.9500	Durbin-Watson stat		0.001594

## Lampiran 5

### Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7069.700296	(28,286)	0.0000
Cross-section Chi-square	2086.652313	28	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOGPTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/12/21 Time: 16:07

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 319

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.50139	2.390218	10.66906	0.0000
PE	-0.073797	0.023512	-3.138652	0.0019
LOGUMP	-0.720540	0.162279	-4.440143	0.0000
INF	-0.060225	0.026544	-2.268897	0.0240
DUMMY	-0.214679	0.262787	-0.816932	0.4146
R-squared	0.076978	Mean dependent var		14.55655
Adjusted R-squared	0.065219	S.D. dependent var		1.024608
S.E. of regression	0.990633	Akaike info criterion		2.834604
Sum squared resid	308.1448	Schwarz criterion		2.893619
Log likelihood	-447.1193	Hannan-Quinn criter.		2.858172
F-statistic	6.546690	Durbin-Watson stat		0.078279
Prob(F-statistic)	0.000045			

## Lampiran 6

### Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.292665	4	0.0542

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PE	-0.000053	-0.000070	0.000000	0.0264
LOGUMP	0.146631	0.146417	0.000000	0.0041
INF	-0.004277	-0.004291	0.000000	0.0158
DUMMY	0.028812	0.028758	0.000000	0.2332

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOGPTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/12/21 Time: 16:07

Sample: 2010 2020

Periods included: 11

Cross-sections included: 29

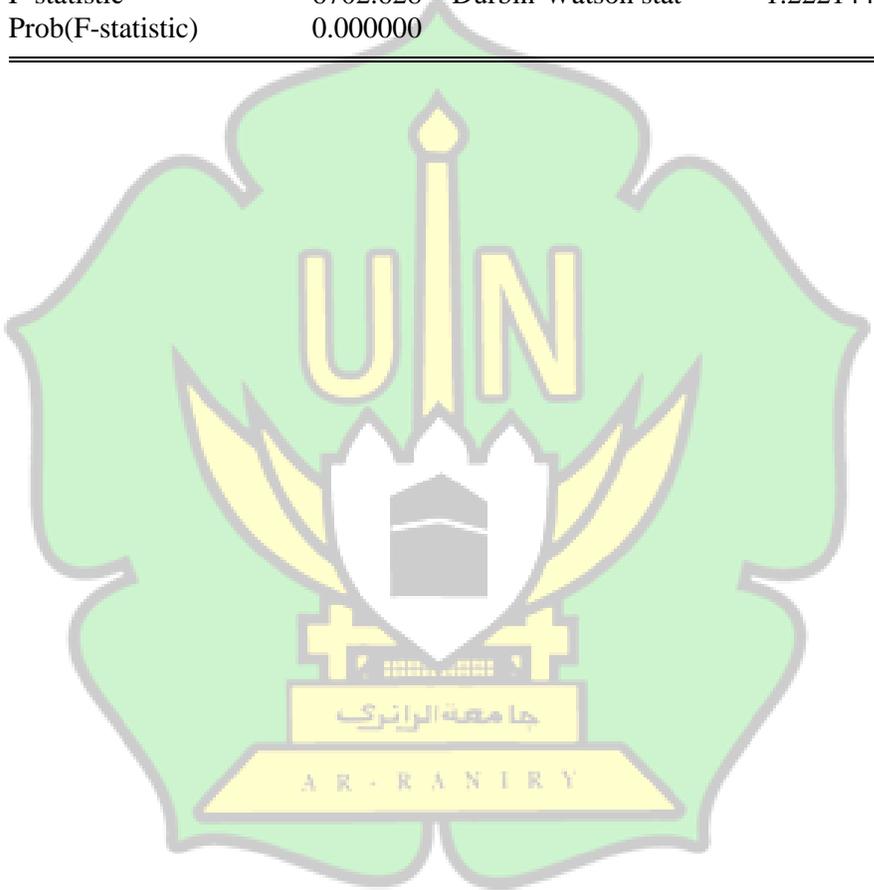
Total panel (balanced) observations: 319

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.48332	0.118595	105.2601	0.0000
PE	-5.27E-05	0.001077	-0.048906	0.9610
LOGUMP	0.146631	0.008036	18.24649	0.0000
INF	-0.004277	0.001123	-3.807171	0.0002
DUMMY	0.028812	0.010930	2.635950	0.0088

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998668	Mean dependent var	14.55655
Adjusted R-squared	0.998519	S.D. dependent var	1.024608
S.E. of regression	0.039426	Akaike info criterion	-3.531077
Sum squared resid	0.444565	Schwarz criterion	-3.141575
Log likelihood	596.2068	Hannan-Quinn criter.	-3.375525
F-statistic	6702.628	Durbin-Watson stat	1.222144
Prob(F-statistic)	0.000000		



## Lampiran 7

### Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

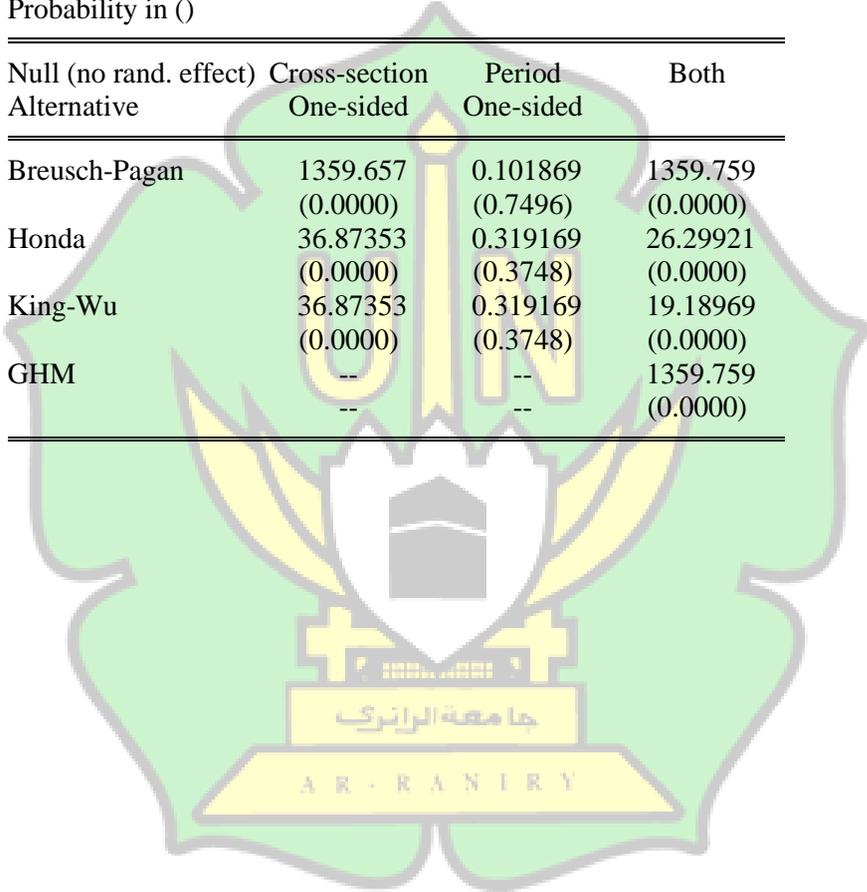
Date: 07/12/21 Time: 16:07

Sample: 2010 2020

Total panel observations: 319

Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	1359.657 (0.0000)	0.101869 (0.7496)	1359.759 (0.0000)
Honda	36.87353 (0.0000)	0.319169 (0.3748)	26.29921 (0.0000)
King-Wu	36.87353 (0.0000)	0.319169 (0.3748)	19.18969 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	1359.759 (0.0000)



## Lampiran 8

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	LOGPTK	PE	LOGUMP	INF	DUMMY
Mean	14.55655	5.179969	14.25476	4.515329	0.090909
Median	14.53418	5.520000	14.29485	3.880000	0.000000
Maximum	16.90213	26.82000	15.26650	11.58000	1.000000
Minimum	12.66523	-9.310000	13.35348	-0.180000	0.000000
Std. Dev.	1.024608	3.149765	0.414338	2.512777	0.287931
Skewness	0.595667	0.274137	-0.087289	0.593095	2.846050
Kurtosis	2.910184	13.69212	2.083251	2.523867	9.100000
Jarque-Bera	18.97177	1523.518	11.57581	21.71523	925.2329
Probability	0.000076	0.000000	0.003064	0.000019	0.000000
Sum	4643.538	1652.410	4547.270	1440.390	29.00000
Sum Sq. Dev.	333.8433	3154.885	54.59301	2007.867	26.36364
Observations	319	319	319	319	319

## Lampiran 9

### BIODATA PENULIS

#### DATA PRIBADI

Nama : Luong Ngoc Quynh  
Tempat/Tgl. Lahir : Campuchia/06 April 1998  
Status : Belum Berkawin  
Alamat : Thon Phuoc Nhon 1, Xa Xuan Hai,  
Huyen Ninh Hai, Tinh Ninh Thuan Viet  
Nam  
No. HP : +601133607875  
Email : 170604131@student.ar-raniry.ac.id

#### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2006-2011 : SRAR Al-Irsyadiyah  
2012-2016 : SMA Al-Tahzib  
2016-2017 : Kolej Universiti Insaniah, Kuala Ketil  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

